

WARTA PENGAWASAN

KAWAL AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR 2 TAHUN 2023

GIAT SARAT MANFAAT



ISSN 0854-0519



Majalah Warta Pengawasan merupakan media informasi dan komunikasi di lingkungan aparat pengawasan serta sebagai sarana untuk memasyarakatkan konsep dan praktik pengawasan kepada seluruh lapisan masyarakat

Alamat Redaksi/Tata Usaha: Gedung BPKP
Pusat Lantai 1 Jalan Pramuka No. 33 Jakarta
Timur 13120 Tel/Fax. +6221-8591-0031,
pes 0102 dan 0103. Desain cover oleh:
Kominfo BPKP/Septian Agam. Diterbitkan
Oleh: Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Berdasarkan:
Keputusan Kepala BPKP Nomor: Kep-
204/K/SU/2013 Tanggal 26 Maret 2013
STT Nomor: 958/SK/Ditjen PPG/STT/1982
Tanggal 20 April 1982, ISSN 0854-0519,
Homepage: www.bpkp.go.id - Email:
wartapengawasan@gmail.com. Dilarang
mengutip atau memproduksi seluruh atau
sebagian isi majalah tanpa seijin redaksi.

Majalah Warta Pengawasan dapat
di unduh melalui



EDITOR'S NOTE

Dalam dunia yang terus berkembang dan penuh dengan tantangan, peran pengawasan intern terasa kian bermakna. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam mewujudkan Visi Indonesia 2045. Melalui pengawasan yang efektif, APIP membantu pemerintah mengidentifikasi risiko, menilai kepatuhan terhadap regulasi, dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara dan daerah.

Memasuki dasawarsa keempat, BPKP berkomitmen terhadap pengawasan yang adaptif untuk pertumbuhan berkelanjutan. Selaku penasihat terpercaya (*trusted advisor*) Presiden RI dan Pembina APIP, BPKP memikul harapan bangsa

akan *delivery* manfaat dari setiap program pemerintah. Hal ini menjadi pesan kunci yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern (Rakornaswasin) Tahun 2023. Merangkul APIP di seluruh nusantara, BPKP memastikan kepatuhan dan akuntabilitas program pemerintah. Sebab, prestasi ekonomi makro Indonesia, perlu didukung pengawasan pada sisi mikro.

Oleh karena itu, majalah Warta Pengawasan Edisi 2 Tahun 2023 kali ini menghadirkan rangkaian artikel yang akan membantu penajaman kualitas pengawasan intern. Kami berharap artikel-artikel ini dapat memberikan wawasan berharga dan memberikan apresiasi atas upaya kolektif dalam menyukseskan pembangunan nasional.

Selamat membaca!

Salam Redaksi

SUSUNAN REDAKSI

Pelindung: Kepala BPKP – **Pembina:** Sekretaris Utama – **Penasihat:** Para Deputi Kepala BPKP – **Penanggung Jawab:** Azwad Zamroddin Hakim – **Kontributor Ahli:** R. Ersi Soenarsih, Setya Nugraha, Iwan Agung Prasetyo – **Kontributor Tetap:** Edi Sunardi, Sindu Senjaya Aji – **Pemimpin Umum:** Riyanti Ridzki Dewi – **Wakil Pemimpin Umum:** Nurly Wulan Sari – **Pemimpin Redaksi:** Ristiandi Wijanarko – **Redaktur Pelaksana:** Nadia Khaerunnisa – **Sekretaris Redaksi:** R. Hanifah – **Reporter:** Gilang Rahmat Hastanto, Ayu Isnı Arum, Amalia Septianti, Adithia Ramadhan, Wiwin Savitri, Putri Septanti Ismalia, Ferina Indah Pamaswari – **Keuangan:** Nurjana Ismet Tuah, Isnawati Ekarini – **Desain Grafis:** Idiya Zikra, Viana Anggraeni Zahrin – **Administrasi:** R. Hanifah – **Dokumentasi:** Edi Purwanto – **Sirkulasi:** Petrus Sonny Santoso Putra

CONTENTS

- 04 THE BRIEF**
Produktivitas dan Kemakmuran Bangsa
- 07 COVER STORY**
Kawal Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi
- 11 COVER STORY**
Capai Indonesia Emas 2045 Bersama APIP
- 15 INDONESIA THIS QUARTER**
- 20 INFOGRAPHIC**
- 22 GOVERNANCE VANTAGE POINT**
Revitalisasi Sektor Wisata melalui Penguatan Tata Kelola Desa
- 28 RISK MANAGEMENT VANTAGE POINT**
Ingek Sabalun Kanai*: Mengelola *Emerging Risks* ala Pepatah Minang
- 35 PUBLIC POLICY**
Kemandirian Fiskal Daerah Pedesaan, Hanya Ilusi?
- 41 PREVIEW**





42 JFA TALK

44 INSPIRING PERSON

Membaca, Sebuah Terapi dan Investasi Diri

50 BOOK REVIEW

Audit Kinerja sebagai Alat Evaluasi Kebijakan Publik

52 MOVIE REVIEW

Dua Hari Menuju Dewasa

54 THE BEAUTY OF INDONESIA

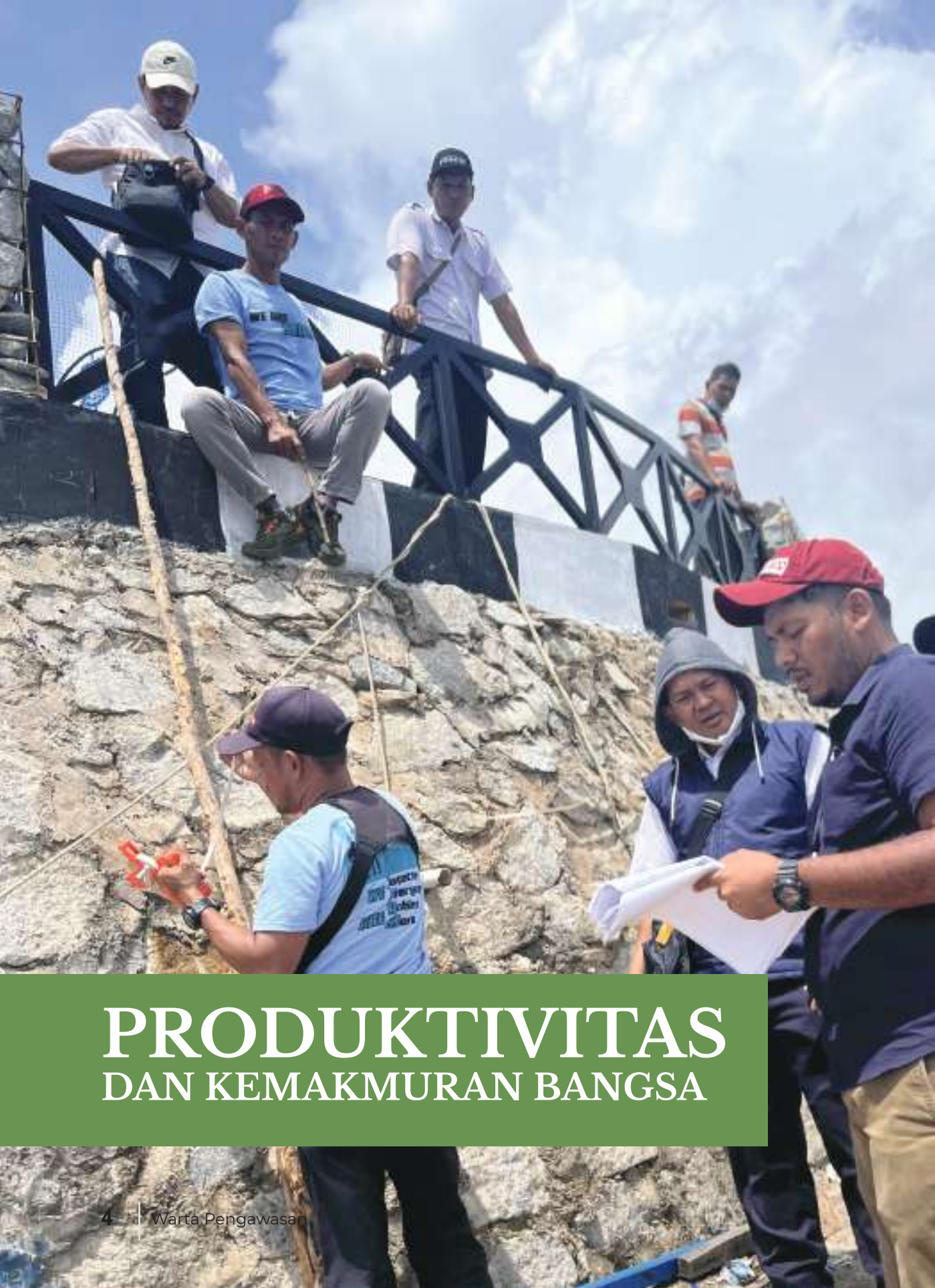
Indahnya Trip Pagi Gunung Bromo

-

KOLOM ILMIAH

02 Refleksi Empat Dekade Audit Internal

12 Seri Kepemimpinan GRC: *Governing Body*
Pengendalian Inflasi di Daerah



PRODUKTIVITAS DAN KEMAKMURAN BANGSA

“

Kapan pun kamu ditanya apakah kamu bisa mengerjakan sesuatu, katakan kepada mereka, **‘Tentu aku bisa!’** Jadilah sibuk dan cari tahu bagaimana cara mengerjakannya”

— Theodore Roosevelt

Foto
BPKP
Bangka
Belitung

Kutipan ini berasal dari presiden ke-26 Amerika Serikat yang juga merupakan sumber inspirasi penciptaan boneka beruang Teddy Bear. Di sini Roosevelt mengajak orang untuk tanpa ragu bersikap produktif kapan pun dibutuhkan. Bersikap produktif memiliki nilai positif, karena memungkinkan orang untuk menciptakan atau memberikan nilai (sesuatu yang berharga) kepada sesama maupun lingkungan.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023, pemerintah berfokus untuk meningkatkan produktivitas negara. Produktivitas diartikan sebagai kemampuan setiap orang atau sesuatu untuk menghasilkan barang atau jasa. Tentu saja, kemampuan antara tiap orang atau entitas berbeda-beda. Sehingga dalam definisi lain, produktivitas diartikan sebagai perbandingan antar barang atau jasa yang dihasilkan (*output*) dengan sumber daya yang digunakan (*input*) untuk menghasilkan barang atau jasa

tersebut. Atau dengan kata lain, produktivitas adalah rasio *output* dengan *input*-nya. Produktivitas bisa dihitung pada tingkat pekerja, unit kerja, perusahaan/ organisasi, industri, hingga nasional.

Banyak hal yang mempengaruhi produktivitas sebuah entitas, seperti sumber daya manusia, teknologi, organisasi, keuangan, manajemen, regulasi, dan lingkungan. Entitas yang ingin produktif harus berusaha agar faktor-faktor tersebut sedapat mungkin berada di dalam kendalinya. Produktivitas sangat penting bagi sebuah negara karena akan menentukan kesejahteraan masyarakatnya. Negara yang produktif akan memiliki harga jual konsumen yang lebih rendah, daya beli masyarakat yang lebih tinggi, serta keunggulan kompetitif atas produknya di tingkat internasional.

Dalam menghitung produktivitas suatu negara, salah satu alat yang bisa digunakan adalah *Total Factor Productivity* (TFP).

Asian Productivity Organization (APO) menjelaskan TFP sebagai produktivitas dari seluruh *input* suatu negara secara bersama-sama. TFP menunjukkan efektivitas faktor produksi (tenaga kerja dan modal) dari waktu ke waktu. TFP memperlihatkan penyebab sebenarnya dari pertumbuhan *output*, dengan mengecualikan pertumbuhan *input* (misalnya besaran modal dan jumlah tenaga kerja). TFP dapat diartikan sebagai sebuah pertumbuhan yang dihasilkan dari inovasi teknologi, serta efisiensi dari keahlian tenaga kerja dan pengelolaan modal.

Sayangnya, data APO per September 2021 menunjukkan kalau TFP Indonesia terus mengalami penurunan selama sepuluh tahun terakhir. Pada 2010 TFP Indonesia berada di angka 1,0, sedangkan di tahun 2019 TFP Indonesia menjadi 0,90. Dibandingkan dengan negara lain, dalam kurun waktu 2010-2019 rata-rata TFP Indonesia tergolong rendah dan berada pada zona negatif. Angka ini menunjukkan kalau Indonesia belum mengoptimalkan faktor-faktor produksinya. Hal ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung stagnan di angka 5 persen.

Peningkatan produktivitas Indonesia dibutuhkan untuk mewujudkan Indonesia Maju 2045, di mana masyarakatnya makmur

sejahtera. Pemerintah sudah menyadari bahwa Indonesia harus terhindar dari *Middle Income Trap* (jebakan negara berpendapatan menengah). Untuk itu, pertumbuhan ekonomi ditargetkan mendekati 7 persen secara konsisten agar bisa mengejar PDB per kapita minimum negara maju sebesar US\$ 12.375 atau Rp189 juta. Sebuah target yang cukup menantang dan butuh konsistensi.

Usaha pemerintah untuk meningkatkan produktivitas nasional butuh pengawalan dari seluruh elemen bangsa, khususnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Dengan kewenangan yang dimiliki, APIP harus berorientasi pada hasil, memastikan bahwa setiap uang yang dibelanjakan dari kantong negara produktif. APIP juga harus berperan untuk memberikan nilai tambah pada tata kelola, pengelolaan risiko, dan kegiatan pengendalian pemerintah yang fokus untuk kepentingan publik. Dengan demikian, pemerintah dapat konsisten menghadirkan layanan yang berkualitas dalam rangka mencapai cita-cita negara.

Mengutip tulisan Danker dan Dohrmann, "*Produktivitas didapatkan ketika pemerintah selalu memberikan jasa berkualitas lebih murah, mencari cara bagaimana meningkatkan layanan dengan biaya yang sama ...*"

(Ristiandi Wijanarko)



Kawal Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi

Ristiandi Wijanarko

Kejar Indonesia Emas

Pada tahun 2045, umur Indonesia genap 100 tahun. Di usia kemerdekaan Indonesia saat itu, penduduk Indonesia didominasi oleh warga berusia produktif. Jika sumber daya manusia Indonesia itu memiliki kapasitas yang optimal, maka Indonesia akan dapat memanfaatkan bonus demografinya. Presiden Joko Widodo pada 2016 telah meminta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas untuk menyusun visi Indonesia 2045 dalam rangka mempercepat terwujudnya cita-cita negara yang tertuang dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Bahkan, dirinya berharap kalau Indonesia dapat menjadi

salah satu dari lima negara berekonomi terkuat di dunia pada 2045. Baru-baru ini cita-cita tersebut dituangkan pemerintah menjadi visi Indonesia Emas 2045 dalam rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045.

Akan tetapi, pandemi Covid 2019 yang mulai mewabah di Indonesia pada awal 2020 menghambat perjalanan bangsa kita untuk meraih visi 2045 tersebut. Penyebaran virus yang masif

dan cepat membuat pemerintah terpaksa membatasi aktivitas masyarakat. Akibatnya, program pembangunan di berbagai bidang pun tersendat.

Patut disyukuri, berkat kerja keras pemerintah bersama seluruh lapisan masyarakat, Indonesia telah terlepas dari pandemi dan beranjak menuju endemi. Dengan aktivitas sosial yang telah terbebas dari pembatasan, maka Indonesia dapat memaksimalkan kapasitasnya untuk memulihkan sekaligus menggenjot perekonomian. Untuk itu, pemerintah fokus dalam meningkatkan produktivitas Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 yang bertema

“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.”

Pengawasan APIP agar Belanja Pemerintah Produktif

Tentu saja, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran esensial untuk memastikan tercapainya tujuan tersebut. Dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Intern (Rakornaswasin) 2023 yang diselenggarakan di kantor BPKP secara *hybrid* pada 14 Juni lalu, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa aparat pengawasan intern harus memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan dari APBN, APBD, dan BUMN semuanya produktif.

“Peran pengawasan sangat sangat sangat penting. Kenapa? Saya juga sering cek ke lapangan, turun ke bawah, saya ingin pastikan bahwa apa yang kita programkan itu sampai betul ke rakyat, sampai ke masyarakat. Karena kita memang lemah di sisi itu, jika tidak



diawasi. Hati-hati, jika tidak cek langsung, jika tidak dilihat. Dipelototi satu-satu. Hati-hati kita lemah di situ. Dipelototi. Kita turun ke bawah. Itu saja masih ada yang bablas, apalagi tidak," dirinya mengingatkan.

Permintaan Jokowi agar APIP memelototi efektivitas belanja pemerintah sangat beralasan. Pasalnya, mengumpulkan uang untuk membiayai program-program pemerintah tidak mudah. Dari sisi pajak, pemerintah selalu kesulitan untuk memaksimalkan potensinya. Berdasarkan data OECD, sejak tahun 2007 hingga 2021 rasio penerimaan pajak dibandingkan dengan PDB Indonesia berkisar antara 10,1% di tingkat terendah pada 2020 dan tertinggi 13% pada 2008[4]. Jika dibandingkan dengan negara tetangga di ASEAN seperti Malaysia (11,8%), Singapura (12,6%), Thailand (16,4%), dan Kamboja (18%), rasio penerimaan pajak dengan PDB pada 2021 Indonesia (10,9%)

lebih rendah. Rasio Indonesia tersebut terlihat semakin kecil jika dibandingkan dengan rata-rata negara maju dalam OECD yang memiliki rasio 34,1% pada 2021.

Di sisi lain, pemerintah juga dihadapi dengan tingginya biaya dana. Berdasarkan data IMF, rasio penerimaan negara dibandingkan PDB Indonesia dalam periode 2007-2021 memiliki rata-rata rasio di angka 15,6%. Angka ini masih di bawah Kamboja (19,6%), Malaysia (22,2%), dan Thailand (21%). Dalam kurun waktu yang sama, rasio belanja pemerintah dibandingkan PDB Indonesia memiliki rata-rata rasio di angka 17,8%. Ini menunjukkan bahwa pemerintah harus menambal selisih belanja dan penerimaan tersebut dengan pinjaman. Padahal, pinjaman merupakan sumber dana yang mahal. Pemerintah kerap dikritik karena *yield* obligasi Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia, Vietnam, dan Filipina. Konsekuensinya, bunga pinjaman telah mengambil porsi belanja yang besar. Pada tahun 2021, dari 427,1 triliun total pembayaran pokok dan bunga pinjaman, 343,5 triliun atau 80,4%-nya merupakan pembayaran bunga pinjaman.

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, efektivitas belanja pemerintah sangatlah penting. Menurut penelitian Herrera dan Pang, belanja pemerintah di negara-negara berkembang berkisar antara 15-30 persen dari Produk Domestik Bruto. Dengan



demikian, perubahan kecil saja dari efisiensi belanja pemerintah dapat memiliki dampak besar bagi PDB dan pencapaian tujuan pemerintah. Oleh karena itu, tidak heran Jokowi begitu gemas dengan tingkah aparturnya yang menghabiskan anggaran dengan tidak produktif.

“Contoh, ada anggaran *stunting* 10 miliar, coba cek lihat betul, untuk apa 10 miliar itu. Jangan membayangkan nanti ini dibelikan telur, dibelikan susu, dibelikan protein, dibelikan sayuran. 10 miliar. Coba dilihat detail ... Saya cek di APBD, Mendagri coba saya mau lihat. 10 miliar untuk *stunting*. Cek. Perjalanan dinas 3 miliar, rapat-rapat 3 miliar, penguatan, pengembangan, apa-apa, *bla bla bla* 2 miliar. Yang *bener-bener* untuk *beli* telur itu *enggak* ada dua miliar *tak* (saya-pen) tengok. Kapan *stuntingnya* akan selesai kalau caranya seperti ini? ini yang harus *dirubah* semuanya,” ungkapnya. Jokowi juga meminta agar APIP mengubah pola pikir pengawasan dari yang semula prosedural menjadi berorientasi pada hasil, untuk memastikan bahwa manfaat program pemerintah sampai kepada masyarakat.

Potensi pemborosan belanja ini sebenarnya sudah menjadi salah satu fokus BPKP dalam melakukan pengawasan. Dalam Rakornaswasin 2023, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh melapor kepada Presiden kalau BPKP mendapati adanya potensi pemborosan alokasi

belanja sebesar 21% dari nilai anggaran yang diuji petik. BPKP juga menemukan bahwa perencanaan dan penganggaran daerah masih belum optimal, dengan 43% program berpotensi tidak optimal mengungkit sasaran pembangunan pada daerah yang diuji petik.

Butuh Komitmen untuk Pengawasan Intern

Efektivitas belanja pemerintah dapat dioptimalkan jika pimpinan instansi baik di tingkat pusat dan daerah memiliki komitmen memanfaatkan peran APIP. Namun sayangnya, komitmen tersebut tidak dimiliki oleh sebagian pimpinan instansi.

“Tantangan utama yang kami hadapi dalam pelaksanaan pengawasan intern adalah upaya pengawalan dan pendampingan belum sepenuhnya diterima dengan baik oleh pimpinan K/L/D. Di lapangan, masih kerap terjadi penolakan atau penghalangan terhadap upaya pengawalan yang kami rancang untuk dilakukan sejak tahap awal program/kegiatan,” lapor Ateh kepada Presiden.

Penolakan ini menjadikan pengawasan intern yang seharusnya dapat mencegah permasalahan semakin besar, menjadi tidak optimal. Akibatnya, banyak contoh di mana permasalahan harus berakhir di wilayah penegakan hukum.

Pulihnya aktivitas sosial menjadi momentum bagi Indonesia untuk meningkatkan produktivitas agar cita-cita Indonesia Emas 2045 bisa tercapai. Peran APIP sangat esensial untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan dapat sampai manfaatnya kepada masyarakat sasaran. APIP tidak dapat bekerja sendiri untuk mengawal keuangan pemerintah. Oleh karena itu komitmen kepala pemerintahan di setiap level untuk mengoptimalkan peran APIP sangat diperlukan.

(Ristiandi Wijanarko)



CAPAI INDONESIA EMAS 2045

Bersama APIP

Fuad Rizky

Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern 2023 (Rakor Wasin 2023) telah digelar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan mengusung tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi,” dengan mengundang APIP baik Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah dan SPI BUMN/ BUMD dan dihadiri sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dan Pimpinan Aparat Penegak Hukum. Rakor yang dibuka secara langsung

oleh Presiden RI, Joko Widodo, menggarisbawahi pentingnya sektor produktif untuk melakukan reformasi dan transformasi, upaya tersebut berguna dalam meningkatkan kinerja yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang tinggi, Pemerintah berupaya maksimal untuk menjaga keberlanjutan penguatan ekonomi nasional. Ya, potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 sampai dengan 2025 diprediksi IMF masih akan tumbuh diatas 5%, dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu *bright spot* pada situasi perekonomian global dunia yang melambat menjadi 2,8% pada tahun 2023. Hal tersebut akan dapat terjaga apabila ada kolaborasi dan sinergi dari pelbagai pemangku kepentingan. Berbagai program transformasi dan reformasi ekonomi harus tetap dijalankan, terutama untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada sesi Rakor Wasin 2023, menjelaskan bahwa Pemerintah saat ini sedang melaksanakan berbagai program transformasi ekonomi sesuai tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 yakni "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", melalui peningkatan kualitas SDM, revitalisasi industri, ekonomi

hijau, reformasi birokrasi dan mendorong peningkatan infrastruktur, baik fisik maupun digital untuk meningkatkan konektivitas. Bonus demografi, yang akan memasuki masa puncaknya pada periode 2020 sampai 2030, juga harus dimanfaatkan agar Indonesia bisa menjadi negara berpendapatan tinggi (*high income country*).

Guna mewujudkan strategi transformasi ekonomi juga dilakukan perbaikan aspek governansi sektor publik dan korporasi. Melalui Keputusan Menko Perekonomian Nomor 44 Tahun 2021 telah diberikan mandat kepada Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) untuk membuat sejumlah Pedoman Governansi sektor publik dan korporasi yang diharapkan dapat melengkapi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

"Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga harus terus mendorong



peningkatan perekonomian inklusif, dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban, terutama untuk memastikan pelaksanaan APBN/ APBD berjalan secara efektif, efisien dan menghilangkan praktik-praktik KKN,” ucap Menko Airlangga.

Dalam hal ini Airlangga menggarisbawahi APIP bukan lagi sebagai *watchdog*, tetapi lebih sebagai mitra strategis Pemerintah, dengan menjalankan berbagai fungsi yakni memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan dan efektivitas (*assurance activities*), memberikan masukan (*consulting activities*), dan memberikan peringatan dini (*anti-corruption activities*). Selain itu, APIP juga berperan penting dalam mengawal kebijakan terkait transisi dari pandemi menuju endemi.

Bercermin dari besarnya tantangan yang dihadapi Indonesia, semakin jelas betapa pentingnya sinergi dan dukungan dari seluruh sektor maupun *stakeholder* dalam mengefektifkan penguatan koordinasi dan dukungan kebijakan dari seluruh pemangku kebijakan.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM, Mahfud MD, tak memungkirkan tanpa keamanan dan ketertiban maka seluruh proses rantai ekonomi mulai produksi, distribusi dan konsumsi menjadi terganggu. Karena keduanya saling berkaitan satu sama lain. Ekonomi yang rapuh juga mempengaruhi keamanan dan ketertiban. Sebaliknya keamanan yang tidak kondusif pasti berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu sebut Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu, Rakornas Wasin 2023 menjadi bagian penting dalam membangun sinergi antar APIP pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar berada dalam satu garis lurus kebijakan. Pengawasan selalu menjadi elemen penting dari sistem

pemerintahan, tanpa pengawasan pelaksanaan pemerintahan tidak akan pernah mencapai hasil yang diinginkan.

“BPKP dan seluruh APIP harus membangun sistem peringatan dini (*early warning system*) untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Berhasilnya pencegahan meningkatkan kepastian peningkatan produktivitas, pemerataan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.”

Sementara itu terkait revitalisasi, hilirisasi industri dan ekonomi hijau, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, hilirisasi dan transformasi ekonomi menjadi kunci Indonesia untuk mencapai visi Indonesia sebagai negara maju pada 2045. Peluang besar Indonesia untuk memainkan peran strategis di pasar global, menyusul meningkatnya permintaan pasar global terhadap komoditas mineral dan produk turunannya serta pengembangan produk teknologi ramah lingkungan.

Dibeberkan Luhut, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mempermudah investasi dan Indonesia berpotensi menjadi lokasi yang sangat menguntungkan bagi perusahaan asing berinvestasi. Melalui upaya transformasi dan reformasi yang konsisten, Indonesia sangat



mungkin mewujudkan visi menjadi Indonesia Maju Tahun 2045. “BPKP akan memainkan peran strategis yang lebih besar ke depan demi mewujudkan visi Indonesia Maju apalagi BPKP telah berkontribusi dalam penghematan keuangan negara,” bebernya.

Cita-cita dalam mewujudkan visi Indonesia Emas Tahun 2045 memang tidak mudah, pelbagai upaya terus digaungkan termasuk BPKP yang terus konsisten mengawal program yang telah dicanangkan pemerintah. Seluruh kedeputian BPKP telah menyusun strategi dan formasi pengawasan yang mumpuni untuk melahirkan hasil komprehensif yang nantinya dapat digunakan para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Kedeputian di BPKP pun berkomitmen mensukseskan setiap kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah dengan mengacu kepada bidang masing-masing.

Sebagai Informasi, BPKP di tahun 2023 menetapkan Agenda Prioritas Pengawasan (APP) dan Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD). Hal tersebut sebagai bentuk pelaksanaan tugas auditor intern pemerintah yang profesional dan responsif dalam mengawal kebutuhan negara. Di tahun ini terdapat 7 sektor strategis pembangunan yang dijabarkan dalam 26 tema dan 105 topik pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional. Sedangkan untuk APPD

BPKP berfokus terhadap 5 sektor strategis pembangunan yang mencakup 64 tema pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah.

Hasil dari komitmen BPKP dalam mengawal program pemerintah dapat dilihat dari kontribusi pengawasan BPKP terhadap keuangan negara Triwulan I Tahun 2023 yang mencapai Rp35,89 triliun. Kontribusi keuangan negara ini terdiri dari efisiensi belanja atau penghematan dan penyelamatan keuangan negara.

Pengalaman merupakan guru terbaik, 40 tahun BPKP berdiri, sudah tentu sudah mempunyai segudang pengalaman melakukan audit baik di pusat maupun daerah. Meski begitu, peran pengawasan juga harus adaptif dengan dinamika yang terjadi. Ruang lingkup yang luas membuat BPKP tidak dapat berjalan sendiri, butuh sinergi, kolaborasi dari pelbagai pihak.

Sekretaris Utama BPKP Ernadhi Sudarmanto mengatakan, pentingnya konvergensi strategi dan perencanaan pengawasan intern secara nasional. Musababnya, guna mendorong perluasan jangkauan pengawasan, efektivitas penggunaan sumber daya, dan hasil pengawasan yang komprehensif.

Selain itu disebutkan Ernadhi, masih dibutuhkan pemerataan penguatan kapabilitas APIP, termasuk penguatan kompetensi personil dan kompetensi entitas. Penguatan mekanisme pemantauan dan daya dorong tindak lanjut temuan/rekomendasi hasil pengawasan dengan efektif. Penguatan peran APIP dalam menjalankan fungsi peringatan dini dan pencegahan.

“Keterlibatan APIP harus dibangun sejak awal, berperan aktif mendampingi dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban,” pungkas Ernadhi.



KADO PRESTASI DI HARI JADI

Empat puluh tahun berdiri, kinerja BPKP tak henti tuai prestasi. BPKP berhasil kantong sejumlah penghargaan meski 2023 baru separuh perjalanan.

- Predikat AA (Sangat Memuaskan) pada Penilaian Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2022 Kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian dari Kementerian PANRB atas upaya BPKP dalam digitalisasi proses kegiatan pengawasan untuk mewujudkan digitalisasi
- arsip yang berkontribusi pada pencapaian target dan prioritas pembangunan.
- Peringkat 1 Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian, Peringkat 1 Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja, Peringkat 1 Pengembangan Kompetensi, dan Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN Terbaik pada BKN Award Tahun 2023 Kategori Non-Kementerian Tipe Besar.
- Predikat Terbaik Kategori Respon Penanganan Kerawanan Unit Pemerintah Pusat dalam BSSN Award 2023.

KERJA BERSAMA KELOLA RISIKO PEMBANGUNAN NASIONAL

Pada 19 Juni 2023, Presiden Joko Widodo membentuk Komite Manajemen Risiko Pembangunan Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN). Perpres tersebut menjadi landasan penerapan MRPN yang dibentuk untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional, mendorong entitas MRPN lebih proaktif dan antisipatif terhadap perubahan organisasi dan lingkungan, serta memberikan keyakinan bagi entitas MRPN dalam menghadapi ketidakpastian untuk mencapai sasaran pembangunan nasional.

Dipimpin oleh Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas, sejumlah kementerian tergabung di dalamnya. Sebagai pengarah, terdapat Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Berperan sebagai Wakil Ketua 1, Menteri Keuangan, dan Wakil Ketua 2, Menteri Dalam Negeri. Empat kementerian lain sebagai anggota, yaitu Menteri BUMN, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Desa PDTT, dan Menteri PANRB. Kolaborasi dan sinergi antar elemen pemerintah menjadi kunci penerapan MRPN. Setiap



elemen pemerintah bersama-sama melakukan identifikasi risiko yang komprehensif, mengembangkan strategi pengelolaan risiko yang efektif, dan mengimplementasikan tindakan pencegahan yang tepat.

PEDOMAN ASESMEN ESG BAGI BUMN SUDAH TERBIT!

BPKP berkolaborasi dengan para ahli dari ClimateWorks Centre dan Monash University dalam mengembangkan Pedoman Asesmen *environment, social, governance* (ESG). Berisi indikator-indikator lingkungan, sosial, tata kelola, dan ekonomi, pedoman ini memotret kualitas ESG di 33 BUMN. Evaluasi atas penerapan faktor-faktor ESG bertujuan untuk memberikan

BPKP GOES TO CAMPUS BUMIKAN PENGAWASAN INTERNAL

BPKP merangkul akademisi melalui program *BPKP Goes to Campus*. Program ini dirancang untuk memberikan tambahan wawasan atas peran dan kontribusi BPKP di lingkungan perguruan tinggi; meningkatkan *stakeholder awareness* dan *engagement* di kalangan akademisi atau dunia pendidikan terhadap value dan kontribusi BPKP; serta membangun hubungan yang baik antara BPKP dengan berbagai perguruan tinggi sebagai media menjalin sinergi dan kolaborasi untuk bersama-



sama mewujudkan pengawasan yang adaptif untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Setelah digelar di seluruh provinsi dengan menggandeng universitas setempat, puncak *BPKP Goes to Campus* dilaksanakan di Universitas Sebelas Maret (UNS). Rektor UNS Jamal Wiwoho menilai bahwa pengawasan BPKP kian humanis dan bukan lagi suatu yang menakutkan. Menurutnya, pengawasan terbaik adalah yang dilakukan sendiri sehingga menjadi mitra yang bermanfaat.

masuk perbaikan atas *Sustainability Reporting* (SR) BUMN yang selanjutnya membuahakan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah.

Vice President of Engagement Monash University Indonesia Grace Wangge menyatakan Pedoman Asesmen ESG yang diterbitkan ini sangat signifikan untuk mendorong penerapan ESG pada BUMN. Senada dengan pernyataan Grace Wangge, *System Lead for Sustainable Finance* pada the ClimateWorks Centre John Vong menyatakan hal serupa. "Pedoman Asesmen ESG ini akan mengakselerasi perkembangan

target dekarbonisasi Indonesia bagi seluruh BUMN", ujarnya.





MENCARI TEROBOSAN MANFAAT DANA DESA

Komisi IV DPD RI berharap BPKP mampu memantau pemanfaatan dana desa agar berdampak nyata bagi masyarakat. Selain itu, pemerataan jumlah penyaluran dana desa juga harus diawasi agar setiap daerah mendapatkan jumlah penyaluran yang sesuai dengan proporsi penduduk.

Mengenai evaluasi yang dilakukan, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang masih menjadi kendala dalam penyaluran dan penyerapan dana desa antara lain kapasitas SDM Aparatur Desa, regulasi, permasalahan hukum di desa, dan kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Beranjak dari analisis tersebut, BPKP telah melaporkan mitigasi yang dapat dilakukan untuk mencegah penyelewengan dana desa.

EXPO PENGAWASAN INTERN: UNJUK KIPRAH DAN SATUKAN LANGKAH

Mengusung tema *"Inovasi dan Kolaborasi Pengawasan Intern Adaptif untuk Pertumbuhan Berkelanjutan"*, BPKP menampilkan hasil kerja, karya, kontribusi, dan inovasi pengawasan melalui Expo Pengawasan Intern di Sasono Langen Utomo, Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Expo ini juga merupakan simbol kolaborasi pengawasan yang menjadi ruh pencapaian tujuan. Para pengunjung dan peserta yang terdiri dari pengawas intern di lingkungan kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, serta BUMN/D, berkesempatan untuk saling belajar dan bertukar pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik pengawasan intern. Selain itu, publik bisa mendapatkan informasi akurat dan terkini mengenai praktik



pengawasan intern pada pemerintahan dan BUMN/D. *Talk show* interaktif yang membahas "Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan dan Pemanfaatan Teknologi dalam Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Audit Intern" terangkai dalam expo dan mengundang antusiasme para pengunjung.

TIGA KESIMPULAN KTT KE-42 ASEAN

Selesai digelar di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 10-11 Mei 2023, KTT Ke-42 ASEAN menghasilkan tiga kesimpulan. Dalam keterangan pers yang diungkapkan oleh Presiden RI Joko Widodo disebutkan bahwa para pemimpin ASEAN memberikan perhatian penuh terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan rakyat, termasuk perlindungan pekerja migran dan korban perdagangan manusia. Selanjutnya, para pemimpin ASEAN juga memberikan perhatian terhadap penyelesaian konflik Myanmar. Terakhir mengenai kerja sama ekonomi, pemimpin ASEAN sepakat untuk membangun ekosistem mobil listrik dan menjadi bagian penting dari rantai pasok dunia.

Presiden juga meresmikan Jalan Lintas Bajo-Golomori KM 16 untuk memastikan kelancaran akses transportasi menuju *venue* KTT ke-42 ASEAN. Sebagai penasihat terpercaya pemerintah, BPKP hadir mendengarkan hambatan-hambatan yang terjadi dalam persiapan infrastruktur dan konektivitas Bajo-Golomori dan memberikan pandangan-pandangan sesuai dengan ranah pengawasan dari BPKP.



HASIL KTT ke-42 ASEAN | 2023

10-11 Mei 2023

Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur

Isu yang dibahas:



1. Pembangunan Komunitas ASEAN
2. Episentrum Pertumbuhan ASEAN
3. Pandangan ASEAN pada Indo-Pasifik
4. Inisiatif integrasi ASEAN
5. Keterhubungan ASEAN
6. Jaringan kota pintar ASEAN
7. Komunitas politik dan keamanan ASEAN
8. Komunitas ekonomi ASEAN
9. Komunitas sosial budaya ASEAN
10. Hubungan eksternal ASEAN
11. Isu regional dan internasional

Hasil Pertemuan



Memberikan perlindungan bagi pekerja migran dan menindak tegas pelaku kegiatan perdagangan manusia



Menegaskan tidak menoleransi pencederaan terhadap nilai kemanusiaan terkait konflik Myanmar serta mendorong kesatuan ASEAN agar tidak mudah dipecah belah



Menguatkan kerja sama ekonomi di antaranya:

- Membangun ekosistem mobil listrik
- Memperkuat implementasi mata uang lokal
- Meningkatkan konektivitas pembayaran digital antarengara



Indonesia ingin melihat ASEAN kuat, mampu menghadapi tantangan terhadap dinamika, dan tetap memegang peran sentra di Kawasan.

Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia

Implementasi Hasil KTT

Seluruh anggota ASEAN harus melaksanakan deklarasi yang diadopsikan melalui KTT ASEAN 2023, termasuk negara yang pemimpinnya tidak menghadiri KTT.

Tindak Lanjut dapat berbentuk kerja sama antarinstansi pemerintah yang disesuaikan dengan deklarasi yang disepakati.

Timeline Event

9 -7 September 2023
Jakarta

ASEAN Foreign
Ministers' Meeting (AMM)

27th ASEAN Political-Security
Community (APSC) Council Meeting

ASEAN Economic
Community (AEC) Council

30th ASEAN Socio-Cultural
Community Council (ASCC) Meeting

43rd ASEAN
Summit Related Summits

ASEAN Business and
Investment Summits

Ilustrasi
**Diana Nur
Pertiwi**



Pandemi telah teratasi, kini momentum akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Foto:
BPKP
Papua Barat

Revitalisasi Sektor Wisata

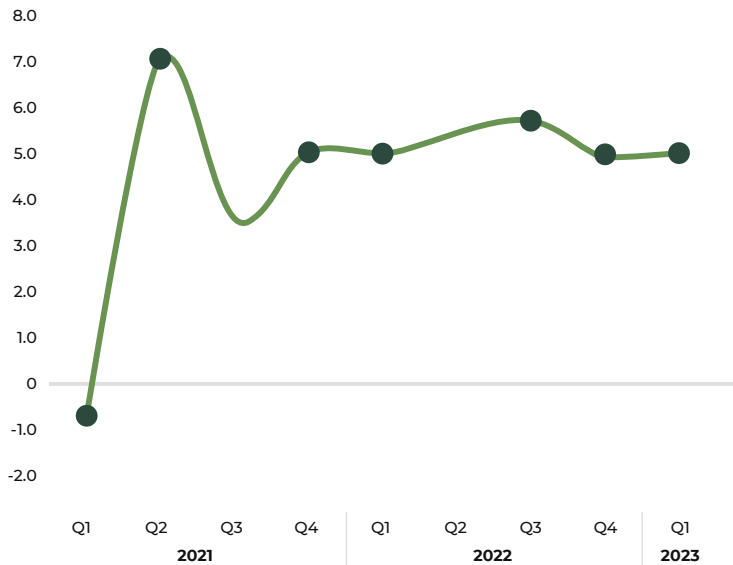
melalui Penguatan Tata Kelola Desa

Carlo Rivelacio,
Auditor pada Deputy Bidang
Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Keberhasilan Indonesia dalam mengendalikan pandemi COVID-19 merupakan kesempatan sekaligus tantangan untuk membangun kembali perekonomian yang pulih dan bertumbuh. Pemerintah perlu mengidentifikasi aspek

ekonomi yang paling mendesak serta mengeksplorasi berbagai opsi kebijakan sebagai respons untuk menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat¹.

Persen



Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi COVID-19

Pulih: Angka sebesar 5,03% (YoY) pada triwulan I tahun 2023 menunjukkan perekonomian Indonesia yang bertumbuh kembali pada kondisi rata-rata sebelum pandemi.

Sumber: Laporan Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan I Tahun 2023

Formulasi pemulihan ekonomi dicanangkan oleh pemerintah dalam tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” sebagai tema pembangunan nasional tahun 2023. Tema tersebut menjabarkan beberapa fokus, arah, dan strategi kebijakan peningkatan produktivitas, salah satunya adalah melalui revitalisasi pariwisata sebagai bagian dari pemulihan dunia usaha.

Kebangkitan Pariwisata dan Masa Depan Desa Wisata

Pariwisata merupakan sektor usaha yang mengalami pemulihan signifikan. Pada

Triwulan I Tahun 2023, sebanyak 2,24 juta wisatawan mancanegara tercatat telah melakukan kunjungan ke Indonesia. Kunjungan tersebut menghasilkan penerimaan devisa pariwisata sebesar USD2,92 M, meningkat sebesar 11,03% dibandingkan Triwulan IV Tahun 2022.

Laporan Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan I Tahun 2023 yang dirilis oleh Kementerian PPN/ Bappenas menyatakan bahwa

¹ World Economic Forum. *Building Back Broader: Policy Pathways for an Economic Transformation* (2021).

signifikansi kunjungan wisatawan mancanegara didukung oleh agenda wisata berkelas internasional, antara lain: *F1 Powerboat Lake Toba, Indonesia Masters 2023, Merumatta Coast Trail*, dan *World Superbike Mandalika*.

Nilai tambah ekonomi yang bersumber dari sektor pariwisata Indonesia masih dapat digali. Tidak hanya melalui agenda wisata berkelas nasional yang sarat dengan gaya hidup urban, melainkan melalui revitalisasi desa wisata. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa peningkatan

kesejahteraan masyarakat dapat ditempuh dengan mengembangkan desa wisata. Dengan demikian, revitalisasi desa wisata merupakan langkah yang tepat dalam menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan memberdayakan masyarakat desa sebagai aktor utama.

Membenahi Desa Wisata dengan Penguatan Tata Kelola

Desa wisata merupakan destinasi wisata alternatif. Terminologi ini muncul sebagai dampak perubahan orientasi destinasi wisata massal yang menawarkan daya tarik rekreasi biasa (biasanya berkaitan dengan panorama alam) menjadi destinasi yang berbasis pada budaya dan keunikan lokal. Hal tersebut termasuk juga pada aktivitas masyarakat pedesaan atau kearifan lokal².



Setiap sudut Indonesia dianugerahi keragaman manifestasi kekayaan budaya dan kebaikan alam yang menjadi daya tarik wisata.

Sumber: Pedoman Desa Wisata (2021)

Urgensi mewujudkan desa wisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk

Pembangunan Kepariwisata Nasional, atau disingkat RIPKN. Lebih lanjut, regulasi tersebut menjadi landasan dalam penetapan kerja sama pengembangan desa wisata yang melibatkan dua kementerian, yakni Kementerian Pariwisata dan Ekonomi (Parekraf) dan

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Desa PDTT).

Kerja sama antara kedua kementerian tersebut telah dijabarkan ke dalam delapan program strategis. Pemerintah perlu memastikan seluruh program strategis dapat memberikan konteks keberhasilan yang pada akhirnya membawa manfaat konkret bagi masyarakat³. Untuk itu, kesepahaman

antara Kementerian Desa PDTT dan Kementerian Parekraf dalam upaya pengembangan desa wisata perlu menetapkan indikator keberhasilan yang dapat bermuara pada peningkatan kontribusi sektor pariwisata dalam pertumbuhan ekonomi desa, yakni nilai PDRB, jumlah kunjungan, dan *spend of money* wisatawan.

No	Program/Kegiatan	Indikator Keberhasilan
1	Harmonisasi kebijakan;	Persentase harmonisasi kebijakan pengembangan desa wisata;
2	Pertukaran data dan informasi;	Persentase rekonsiliasi data dan informasi pengembangan desa wisata
3	Penelitian desa wisata;	Persentase pemanfaatan penelitian desa wisata;
4	Sosialisasi, pelatihan, pendampingan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi;	a. Persentase SDM desa yang meningkat kompetensinya b. Persentase implementasi kebijakan pengembangan desa wisata oleh pelaku usaha wisata pada desa;
5	Peningkatan kualitas sarana-prasarana, pengelolaan, promosi dan pemasaran wisata;	a. Persentase sarana dan prasarana wisata dalam kondisi baik b. Persentase penurunan temuan atas pengelolaan aset c. Indeks kualitas layanan promosi dan pemasaran desa wisata (dengan mempertimbangkan persyaratan, prosedur, ketepatan waktu, tarif, produk layanan, kompetensi petugas, perilaku, sarana dan prasarana, penanganan pengaduan, otomatisasi dan integritas pelayanan).
6	Pengembangan usaha pariwisata melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desma)	Produk domestik bruto di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah (termasuk BUM Des dan BUM Desa);
7	Dukungan kemitraan usaha antarpelaku usaha industri pariwisata.	Persentase peningkatan laba pelaku usaha wisata yang melakukan kemitraan

Penetapan Indikator Keberhasilan Pengembangan Desa Wisata antara Kementerian Desa PDTT dengan Kementerian Parekraf

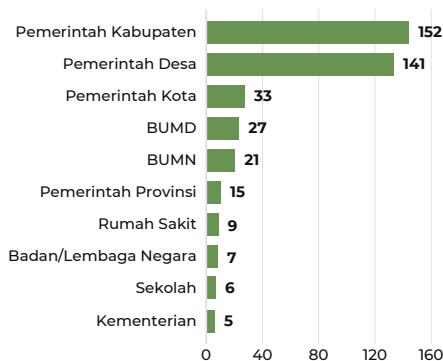
Sumber: Diolah dari hasil RIPKN dan Nota Kesepahaman Pengembangan Wisata dan/atau Ekonomi Kreatif di Desa, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Transmigrasi

Selain untuk mewujudkan pariwisata desa yang mampu menggerakkan perekonomian nasional, penyelenggaraan pengembangan desa wisata harus terbebas dari praktik

kecurangan. Manajemen risiko kecurangan dapat dijadikan sebagai sistem antikorupsi pada pemerintahan desa.

² Buku Pedoman Desa Wisata (2019)

³ Arahan Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Tahun 2023.



Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Lembaga pada Tahun 2020

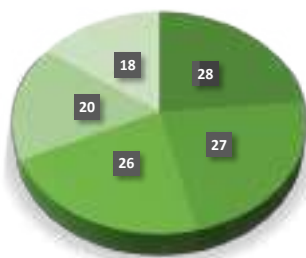
Pemerintah Desa menduduki posisi kedua sebagai lembaga dengan kasus korupsi terbanyak pada tahun 2020. Berdasarkan aktor, pada tahun tersebut tercatat 132 kepala desa terjerat kasus korupsi.

Sumber: *Indonesia Corruption Watch* dalam Buku Panduan Desa Antikorupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (2021)

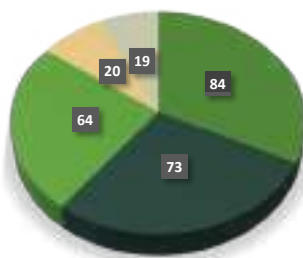
Kepala desa dan perangkat desa termasuk dalam lima aktor korupsi terbesar yang ditangani oleh KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan

Sumber: Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022 oleh ICW

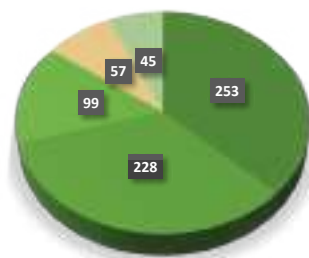
5 Besar Aktor Ditangani KPK



5 Besar Aktor Ditangani Kepolisian



5 Besar Aktor Ditangani Kejaksaan



■ Pegawai Pemerintah Daerah
■ Swasta

■ Legislatif
■ Pegawai K/L/PD

■ Kepala Daerah
■ Kepala Desa

■ Perangkat Desa
■ Tenaga Pendidikan Sekolah/Sederajat

Manajemen risiko kecurangan pada konteks pengembangan desa wisata perlu dihadirkan untuk menjamin akuntabilitas kinerja dan keuangan

pengembangan desa wisata, misalnya pada pengelolaan Pendapatan Asli Desa atas hasil usaha pariwisata.

No	Risiko Kecurangan	Mitigasi Risiko
1	Nilai RAB pembangunan sarana-prasarana pendukung pariwisata di atas harga pasar dan dibayarkan berdasarkan kesepakatan lain.	Meningkatkan pelibatan dan pemahaman warga desa atas mekanisme pengembangan desa wisata; Mengoptimalkan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam fungsi pengawasan; Mewajibkan publikasi rincian penggunaan dana pengembangan desa wisata secara berkala; Meningkatkan kompetensi perangkat desa dalam mengelola kepariwisataan secara akuntabel
2	Pertanggungjawaban pembangunan fisik sarana-prasarana pendukung pariwisata yang seharusnya dibiayai dengan dana desa dilakukan dengan sumber dana lain	
3	Otorisasi ilegal pengeluaran dana dengan modus peminjaman sementara dana desa	
4	Pemotongan dana desa/pungutan liar	
5	Otorisasi pajak/retribusi pariwisata tanpa penyetoran ke kas negara/kas desa.	

Risiko Kecurangan Pengembangan Desa Wisata

Sumber: Diolah dari Buku Panduan Desa Antikorupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (2021)

Program pemulihan ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintah pada tahun 2022 berhasil meningkatkan capaian pariwisata dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun demikian, ketidaktercapaian beberapa indikator strategis yang relevan dengan pengembangan desa

wisata menunjukkan pemerintah masih perlu membenahi tata kelola. Gambaran antara target dan realisasi serta capaian sasaran strategis pengembangan desa wisata dapat disajikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Mewujudkan pariwisata desa yang mampu menggerakkan perekonomian nasional	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Juta orang	8,5 - 10,5	5,47	57,58
	Jumlah pergerakan wisatawan nusantara	Juta pergerakan	260 - 280	633-703	247,41%
	Jumlah penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara	Miliar USD	10,6 - 13,1	4,26	35,95
	Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara ¹⁾	N/A			
	Produk domestik bruto di bidang kepariwisataan ²⁾	%	4,3	3,6	83,72

Gambaran Pencapaian Sasaran Strategis Pengembangan Desa Wisata Semester Tahun 2022

1) Belum dapat diperoleh

2) Disubstitusi dengan persentase kontribusi produk domestik bruto pariwisata

Sumber: Diolah dari data Badan Pusat Statistik, Rencana Strategis Kementerian Parekras Tahun 2020-2024, dan data dari situs kemenparekras.go.id

Dari tabel di atas terlihat bahwa, sebanyak 3 dari 5 indikator kinerja (60%) belum mencapai target. Ketiga indikator tersebut adalah jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dengan capaian 57,58%, jumlah penerimaan devisa dari wisman dengan capaian 35,95%, dan produk domestik bruto di bidang kepariwisataan sebesar 83,72%. Di sisi lain, jumlah pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) meroket dengan capaian 247,41% meskipun jumlah pengeluaran wisnus belum dapat diperoleh dalam dokumen akuntabilitas kinerja Kementerian Parekras.

Capaian-capaian tersebut memang belum dapat disimpulkan mencapai target secara

menyeluruh. Namun demikian, sebagai hasil dari program pemulihan ekonomi dari dampak pandemi, capaian kinerja kepariwisataan tahun 2022 pada umumnya mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021. Kontribusi desa wisata dapat dijadikan sebagai alternatif pemulihan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan inklusivitas dengan mengedepankan peran masyarakat marjinal di masa berikutnya.

INGEK SABALUN KANAI*:

Mengelola *Emerging Risks* ala Pepatah Minang

Gilang Rahmat Hastanto,
Auditor Muda pada Biro Hukum dan Komunikasi





Pada tahun 2015, TED Talks mengundang multimilyuner Bill Gates untuk berbicara mengenai ancaman bagi dunia di masa mendatang. Gates, pendiri raksasa teknologi dunia Microsoft, menganggap bahwa ancaman terbesar dunia dalam beberapa tahun mendatang adalah ancaman virus. Ia mendasarkan argumennya pada berjangkitnya wabah ebola di Afrika. Gates bahkan meramalkan bahwa ancaman terbesar bisa saja datang dari virus flu. Siapa sangka, lima tahun kemudian prediksi Bill Gates menjadi kenyataan. COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 mewabah hingga menjadi pandemi dan melumpuhkan berbagai sektor kehidupan di dunia.

Sebelum wabah Covid-19 melanda dunia, kita telah memiliki pengetahuan mengenai risiko ancaman virus ini. Namun, kita belum sepenuhnya memahami kemungkinan terjadinya pandemi dan dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan. Risiko semacam ini, yang sebetulnya bisa terdeteksi tetapi belum kita pahami sepenuhnya, bisa kita sebut dengan istilah *emerging risk*.

Pembahasan mengenai *emerging risks* sebenarnya sudah dimulai sejak lama. Pandemi Covid-19 pun membuat topik ini kembali ramai dibicarakan. Kini, di tahun 2023, *emerging risks* yang juga ramai dibicarakan antara lain adalah risiko perubahan iklim, risiko

akibat perang yang terjadi di Eropa dan risiko siber, misalnya berupa penyalahgunaan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*).

Definisi *Emerging Risks*

Cambridge Dictionary

mendefinisikan *emerging* sebagai “*starting to exist*”. Oleh karena itu, secara harfiah *emerging risks* dapat didefinisikan sebagai risiko yang mulai muncul mewujud. Meskipun belum terlalu tepat, definisi dapat membantu memberi pemahaman awal mengenai *emerging risks*.

Flage dan Aven (2015) dalam “*Emerging risk – Conceptual Definition and A Relation to Black Swan Type of Events*” dapat memberi penjelasan lebih lanjut. Dari penelitiannya, mereka menyimpulkan bahwa *emerging risks* berhubungan dengan aktivitas yang latar belakangnya masih belum kita pahami secara menyeluruh tetapi ada indikasi atau keyakinan beralasan bahwa suatu kejadian dengan jenis baru (yang berhubungan dengan aktivitas tersebut) dapat terjadi di masa depan. Kejadian ini berpotensi memiliki dampak besar pada hal-hal yang dianggap berharga bagi manusia. Mereka juga menjelaskan bahwa kurangnya latar belakang pengetahuan terhadap risiko ini mengakibatkan sulitnya menentukan kejadian tersebut. Kesulitan tersebut misalnya dihadapi dalam menentukan bagaimana skenario kejadian tersebut.

Mirip dengan definisi di atas, International Risk Governance Council atau IRGC (2015) dalam *Guidelines for Emerging Risks Governance* menjelaskan bahwa *emerging risks* adalah risiko baru atau risiko biasa yang muncul dalam kondisi baru atau kondisi yang tidak biasa.

Deloitte, salah satu perusahaan penyedia jasa profesional terbesar di dunia, dalam "*Finding Blind Spots: Recognising Emerging Risks and Opportunities*" (2021), mengadopsi definisi ini dengan membagi *emerging risks* ke dalam dua bentuk, yaitu:

1. Risiko yang tidak pernah diduga sebelumnya atau "risiko baru"
Yaitu risiko yang muncul akibat perubahan lingkungan operasi, baik internal maupun eksternal. Risiko-risiko ini belum pernah diidentifikasi sebelumnya.
2. Risiko yang muncul kembali (*re-emerge*)
Yaitu risiko yang muncul akibat perubahan cara pandang terhadap definisi, dampak, atau pengelolaan risiko yang sudah teridentifikasi untuk merefleksikan pemahaman yang baru atau berbeda sebagai akibat perkembangan terhadap lanskap operasi.

Identifikasi dan Penanganan *Emerging Risks*

Salah satu cara mengidentifikasi *emerging risks* adalah menggunakan pendekatan yang digunakan oleh Deloitte (2021) sebagai berikut:



1. Horizon Scanning

Tahapan ini bertujuan mencari tanda-tanda kecil perubahan (bisa berupa isu kecil atau hal baru dan tidak terduga), tetapi sebenarnya bisa merupakan bagian dari pola yang signifikan jika dihubungkan dengan informasi lain atau jika dilihat dari sisi lain.

Penilaian komprehensif dalam tahap ini memanfaatkan jangkauan sumber informasi yang luas. Dalam melakukan penilaian ini, Deloitte menyarankan untuk mempertimbangkan enam area tematis yaitu teknologi, pola pikir pemangku kepentingan, sumber pasokan, ekonomi, harapan-harapan sosial dan saluran pasokan menuju pasar. Dalam tahapan ini sangat penting melibatkan sumber informasi internal maupun eksternal. Dalam keterlibatan sumber internal, penting sekali melibatkan seluruh pegawai dari berbagai demografi dan kelompok usia agar opini dan



pemikiran yang menjadi bahan pertimbangan lebih beragam.

2. *Consolidate, Recognise, Evaluate*
Deloitte (2021) memulai proses penyaringan informasi dengan konsolidasi untuk memastikan risiko dan tema yang sama digolongkan ke dalam kelompok yang sama. Pembentukan tim lintas fungsi dapat membantu menyelidiki bagaimana dampak risiko pada rantai manfaat, dengan mempertimbangkan ancaman dan peluang yang ada pada hal-hal berikut: produk dan layanan yang ditawarkan saat ini, kebutuhan pelanggan, masa depan industri dan model bisnis. Selain itu, kita juga dapat mempertimbangkan dampak risiko pada lima modal ketahanan yaitu keuangan, manusia, struktur, sosial dan alam. Evaluasi terhadap linimasa kemunculan dan kecepatan perkembangan risiko atau peluang dapat menunjukkan seberapa banyak

perhatian yang perlu diberikan terhadap kemunculan risiko ini.

3. *Prioritize and Agree Action*
Pakar-pakar yang terlibat dan tim pengelola risiko harus membuat prioritas berdasarkan dampak dan kelogisan informasi yang mereka miliki. Selain itu, mereka harus menyepakati tindakan yang akan diambil terhadap tiap-tiap kandidat peluang dan *emerging risks*, yaitu berupa:
 - a. *Monitored*: Memantau risiko atau peluang tersebut dengan menyepakati apa-apa saja karakteristik risiko atau peluang yang akan diselidiki dan kapan peluang atau *emerging risks* tersebut perlu dipertimbangkan kembali.
 - b. *Managed*: Menerimanya sebagai risiko atau peluang dan mengelolanya dalam kerangka manajemen risiko. Perlu diingat bahwa parameter-parameternya kemungkinan besar masih belum bisa dipastikan hingga ada perkembangan pengetahuan baru.
 - c. Aktivitas manajemen terkait hal ini bisa berupa aktivitas pengendalian atau bisa berupa mitigasi risiko.
 - d. *Discounted*: Mengabaikan risiko atau peluang tersebut apabila *emerging risk* or peluang tersebut dianggap tidak relevan.

Selain itu, penggunaan mahadata dan analisis data dapat membantu

dalam menemukan tanda-tanda awal *emerging risks*. Akan tetapi, dalam pemanfaatan mahadata ini, tetap perlu ada dukungan dari manusia dan organisasi. KPMG menjelaskan hal ini dalam "Identify Emerging Risks before It's Too Late" (2020). Menurut KPMG, ada tiga alat penting yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi dan mengelola *emerging risks*, yaitu:

1. Data dan Analisis

Salah satu tantangan dalam mengelola *emerging risks* adalah kesulitan dalam mengukur risiko ini. Akan tetapi, petunjuk-petunjuk awal mengenai risiko ini bisa saja muncul dari data-data yang telah dikumpulkan. Data-data yang dikumpulkan oleh organisasi dapat bersumber dari data internal maupun eksternal. Oleh karena data-data yang dikumpulkan ini pasti berjumlah besar, maka pemanfaatan data ini memerlukan cara khusus. Misalnya bisa dengan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI), *machine learning*, dan *predictive modeling* dalam analisisnya.

2. Wawasan ke Depan dari Manusia

Peluang dan *emerging risks* seringkali belum dihitung atau diukur secara tepat tetapi sudah tercatat dalam ingatan manusia. Pengetahuan ini bisa saja mengandung informasi tentang hal-hal yang saling berhubungan dalam proses bisnis dewasa

ini. Untuk memperoleh data-data kualitatif ini, organisasi bisa memanfaatkan survei, wawancara, lokakarya atau kombinasi dari semuanya. Untuk meminimalisir bias, proses ekstraksi data ini perlu melibatkan beragam kelompok dan demografi.

Deloitte menggunakan beberapa metode dalam menggali informasi untuk membantu organisasi mendeteksi tanda-tanda awal munculnya risiko yaitu:

- a. Melakukan *pre-mortem assesment* dengan membayangkan bahwa risiko tersebut telah terjadi.
- b. Meminta pendapat ahli untuk melihat tren yang mulai muncul dengan menggunakan metode yang ilmiah dan berorientasi pada masa depan.
- c. Analisis skenario terhadap kemungkinan kombinasi kejadian di masa depan dengan mempertimbangkan berbagai alternatif perkembangan tren. Selain itu, dapat juga dengan melakukan *wargaming* yaitu bermain skenario dengan berpartisipasi dalam kompetisi dan menyusun strategi untuk melalui berbagai kondisi.
- d. Menggunakan permodelan *system dynamic* (SD), yaitu suatu pendekatan untuk memahami perilaku suatu sistem seiring berjalannya waktu. Model ini dibangun dengan mempertimbangkan

masuk dari orang-orang yang memahami cara kerja interaksi sistem. Semua faktor-faktor yang berhubungan dianalisis dengan mempertimbangkan berbagai hal.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang baik akan membantu menyokong pemanfaatan data dan analisisnya serta pengetahuan manusia. Struktur yang terbentuk haruslah memungkinkan aliran informasi kualitatif dan kuantitatif. Aliran informasi dalam sistem ini bukan bersifat hierarkis melainkan lebih berupa umpan balik secara timbal balik. Kombinasi antara para pembuat kebijakan dengan sistem monitoring internal sangat diperlukan dalam mengidentifikasi serta mengelola peluang dan *emerging risks*. Selain itu, organisasi juga perlu membangun budaya belajar (*learning organization*). Tujuannya agar orang-orang dalam organisasi secara kolektif senantiasa mengembangkan pola pikir dan memiliki pemahaman terhadap isu-isu yang muncul.

Tak Kenal maka Tak Siap

Sebagaimana dinyatakan oleh KPMG (2020), cara terbaik organisasi untuk mempersiapkan diri dari kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya adalah dengan mendeteksi risiko pada saat kemunculannya, bukan pada saat risiko tersebut benar-benar telah terjadi dan menjadi masalah. Untuk mempersiapkan diri, organisasi perlu terlebih dahulu mengidentifikasi dan mengenali apa-apa saja yang akan menjadi *emerging risks*. Pengelolaan terhadap *emerging risks* ini perlu melibatkan berbagai pihak dalam organisasi serta menggunakan berbagai sumber daya. Dengan melakukan hal ini, informasi yang diperoleh akan lebih komprehensif karena bersumber dari pengetahuan kolektif organisasi dan menggunakan data-data terkini. Tentu saja hal ini penting dilakukan agar organisasi tidak lagi kecolongan. Sebagaimana saat pandemi kemarin, kita belajar bahwa organisasi yang mampu bertahan adalah organisasi yang paling siap terhadap segala kemungkinan.

**Ingek sabalun kanai: pepatah Minang yang berarti "ingat (berhati-hati) sebelum kena (masalah)"*

Referensi

Deloitte. 2021. *Finding Your Blind Spots: Recognising Emerging Risks and Opportunities*. Deloitte.
Cambridge Dictionary. *Emerging*.
<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/emerging>. Diakses pada 30 Juli 2023.

Flage, R., Aven, T. 2015. *Emerging Risk – Conceptual Definition and A Relation to Black Swan Type of Events*. Publication.
Gates, Bill. 2015. *Bill Gates: The Next Outbreak? We're not Ready*. TED. https://www.youtube.com/watch?v=6Af6b_wyiwl. Diakses pada 30 Juli 2023.
KPMG. 2020. *Identify Emerging Risks Before It's Too Late*. KPMG.

*Orang boleh pandai
selinggi langit,
tapi selama ia tidak menulis,
ia akan hilang
di dalam masyarakat
dan dari sejarah.
Menulis adalah
bekerja untuk keabadian.*

- Pramoedya Ananta Toer



Redaksi Warta Pengawasan turut berduka atas berpulangnya salah satu kontributor Warta Pengawasan, Ibu Nur Ana Sejati.

Karya dan gagasan almarhumah akan tetap dikenang sebagai warisan yang berharga. Semangat dan dedikasinya memberikan inspirasi bagi dunia pengawasan intern.

Semoga segala amal kebaikan almarhumah menjadi pahala yang terus mengalir dan menerangi jalan kehidupan bagi mereka yang ditinggalkan.

Kemandirian Fiskal Daerah Pedesaan, Hanya Ilusi?

Nur Ana Sejati,
Auditor Muda Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan



Foto:
BPKP Maluku
Utara

Prolog

Pertengahan tahun 2020, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menerbitkan Laporan Hasil Reviu atas Kemandirian Fiskal Daerah tahun 2018 dan 2019. Hasil perhitungan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) menunjukkan adanya kesenjangan kemandirian fiskal antar daerah yang sangat tinggi. DKI Jakarta mampu mencapai angka sebesar 0,7107, sementara Provinsi Papua hanya mendapatkan skor 0,0427. Kesenjangan tidak hanya terjadi di tingkat provinsi, tetapi juga pada level kabupaten/kota. Kabupaten Badung di Bali menempati posisi tertinggi hingga mendapatkan

skor sebesar 0,8347. Di sisi lain, nun jauh di bagian timur, Kabupaten Deiyai di Papua hanya mampu bertengger di angka 0,0031.

Tak menunggu lama, laporan BPK ini pun ramai di berbagai media yang secara umum menyatakan keprihatinan dengan tingginya kesenjangan capaian IKF antar daerah. Terlebih lagi, kesenjangan antara pembangunan antara Jawa dan luar Jawa tampak semakin tajam. Seluruh provinsi di Pulau Jawa meraih predikat “Mandiri”, kecuali D.I. Yogyakarta, dengan kriteria IKF antara 0,5 hingga 0,75. Dua provinsi di luar Jawa yang meraih predikat yang sama adalah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Selain kedua provinsi tersebut masih berstatus “Belum Mandiri” dan “Menuju Kemandirian”.

Tulisan berikut hendak menempatkan hasil revidu terhadap IKF pada konteks yang lebih luas. Geliat perekonomian yang begitu kuat di daerah dengan status kota, daerah yang kaya dengan sumber daya tambang, dan faktor demografi turut andil dalam menentukan skor yang jauh lebih tinggi. Sebaliknya, daerah pedesaan yang mengandalkan sektor pertanian cenderung tidak bisa melakukan lompatan untuk mendongkrak IKF. Tidak mengherankan kalau selama rentang waktu enam tahun *gap* IKF antara kedua daerah tersebut, justru terus meningkat.

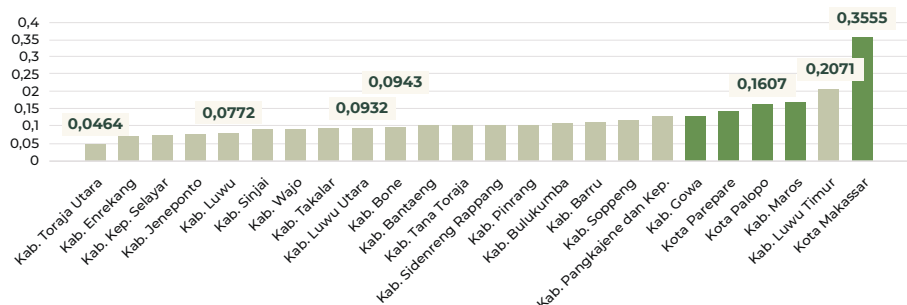
IKF dan Aktivitas Perekonomian

Hasil revidu atas kemandirian fiskal daerah tersebut sebenarnya tidaklah terlalu mengejutkan. Jika dirunut dari perhitungan IKF, hasilnya bisa ditebak. Indeks Kemandirian Daerah (IKF) dihitung dengan membagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan. Hal ini berarti bahwa IKF berbanding lurus dengan PAD dan berbanding terbalik dengan total pendapatan. Semakin tinggi proporsi PAD yang diperoleh pemda dibandingkan dengan jenis pendapatan lainnya, semakin tinggi skor IKF yang dapat dicapai.

PAD merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Tinggi rendahnya

PAD, khususnya pajak daerah dan retribusi daerah sangat ditentukan oleh kuat tidaknya geliat perekonomian suatu daerah dan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki daerah. Kedua hal inilah yang menjadi kunci utama tinggi rendahnya PAD suatu daerah.

Lihat saja, daerah-daerah yang memiliki karakter perkotaan secara umum mampu mendapatkan IKF yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang mengandalkan perekonomian pada sektor pertanian. Tak hanya di Pulau Jawa, kaidah ini juga berlaku di Sulawesi Selatan. Makassar sebagai daerah perkotaan dengan aktivitas perekonomian paling tinggi di Sulsel memiliki IKF yang jauh mengungguli daerah-daerah lain di provinsi tersebut, atau mencapai 0,3555. Meski dengan capaian setengah dari capaian Kota Makassar, Kota Parepare dan Kota Palopo juga relatif lebih tinggi dibanding daerah lain. Sementara, Kabupaten Maros dan Gowa adalah daerah penyangga yang mendapat keuntungan dari percikan ekonomi Kota Makassar.



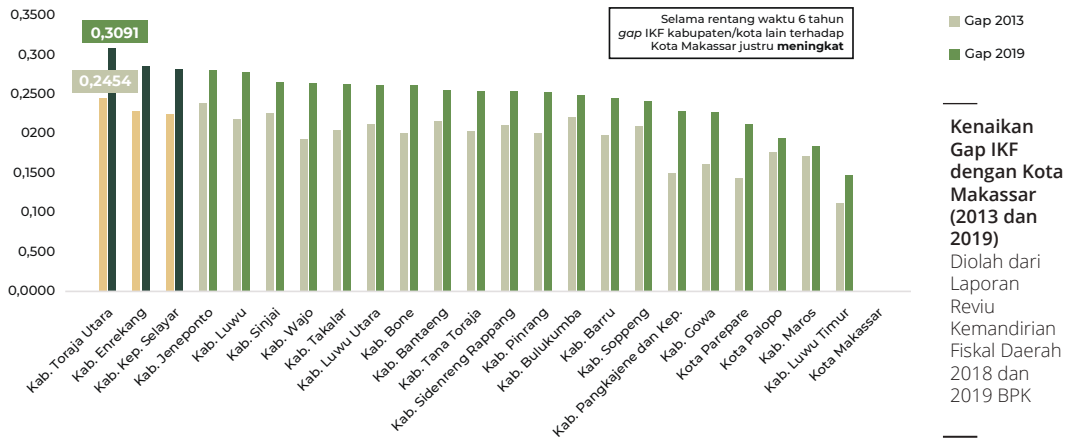
Kemandirian Fiskal Daerah 2019
Diolah dari Laporan Revidu Kemandirian Fiskal Daerah 2018 dan 2019 BPK

Hasilnya, kedua daerah tersebut mendapatkan IKF yang juga relatif lebih tinggi dibanding daerah lainnya. Berbeda dengan Luwu Timur, meski kabupaten ini berjarak lebih dari 500 km dari Kota Makassar, Luwu Timur mendapatkan berkah dari sumber daya mineral bukan logam sehingga mampu mendongkrak IKF dan menempati urutan kedua.

Perbedaan karakter daerah ini menjadikan peningkatan kemandirian fiskal sulit dicapai, khususnya untuk daerah-daerah yang mengandalkan perekonomian dari sektor pertanian. Memang, IKF secara umum terus mengalami peningkatan. Hanya saja,

peningkatan tersebut tidak sebanding dengan peningkatan di daerah perkotaan. Hal ini semakin memperlebar *gap* IKF antara daerah perkotaan dan daerah yang mengandalkan sektor pertanian. Kesenjangan IKF seluruh kabupaten/kota lain di Sulsel terhadap IKF Kota Makassar mengalami peningkatan selama rentang waktu 2013 dan 2019.

Sebut saja Toraja Utara yang memiliki IKF terendah di Sulsel. Kesenjangan IKF daerah tersebut dengan Kota Makassar pada tahun 2013 sebesar 0,2454. Kesenjangan IKF semakin melebar menjadi 0,3091 pada tahun 2019, atau mengalami peningkatan sebesar 0,0637. Hal ini mengindikasikan pergerakan perekonomian Kota Makassar tidak seirama dengan peningkatan di Kabupaten Toraja Utara. Hal yang sama juga terjadi pada kabupaten lain di Sulawesi Selatan di mana *gap* IKF dengan Kota Makassar semakin besar.

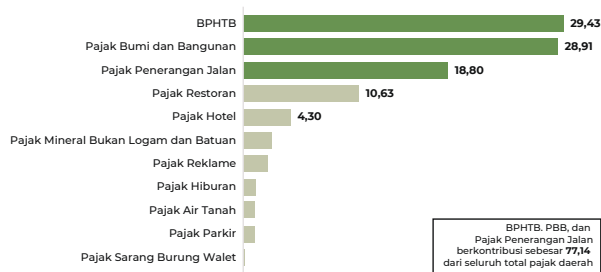


Demografi Pengaruhi PAD

Status kemandirian fiskal daerah juga tak bisa dilepaskan dari status demografi masyarakat. Daerah padat penduduk identik dengan tingginya aktivitas perekonomian yang

terus bergerak. Hal ini pada akhirnya akan membawa dampak positif terhadap PAD yang merupakan komponen utama dalam menentukan skor IKF. Kota Makassar dengan jumlah penduduk sebesar 1,4 juta merupakan modal signifikan untuk memobilisasi PAD, khususnya dari pajak dan retribusi daerah.

Hal ini sejalan dengan data tingkat kontribusi per jenis pajak daerah terhadap total pajak daerah kabupaten/kota. Dalam Laporan Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah Edisi XXVI yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, menunjukkan bahwa BPHTB, PBB, dan pajak penerangan jalan merupakan tiga jenis pajak terbesar penyumbang pendapatan dari pajak daerah. Ketiga hal ini sangat terkait dengan faktor kependudukan. Daerah yang memiliki jumlah penduduk besar, cenderung memiliki BPHTB, PBB, dan Pajak Penerangan Jalan yang tinggi juga.



Tingkat Kontribusi per Jenis Pajak Daerah pada Total Pajak Daerah Kabupaten/Kota (Tahun 2017 – 2021)
 Diolah dari Laporan Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah Edisi XXVI oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

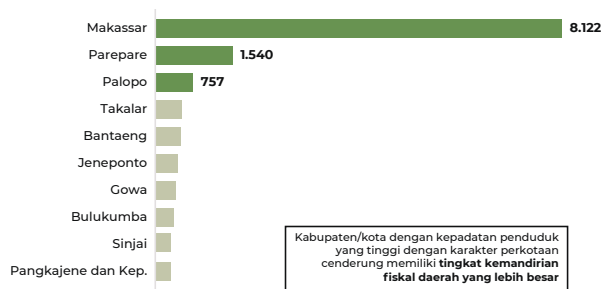
BPHTB dan PBB terkait dengan kepemilikan tanah. Harga tanah di daerah perkotaan dengan populasi penduduk yang besar memiliki nilai jual objek pajak (NJOP) yang jauh lebih tinggi dibanding daerah dengan populasi penduduk rendah. Banyaknya jumlah penduduk tentu akan menentukan tinggi rendahnya PBB. Belum lagi, tingginya NJOP di kota besar akan meningkatkan nilai PBB yang diterima oleh pemerintah daerah.

Senada dengan hal tersebut, BPHTB yang diperoleh pemda juga jauh lebih tinggi

sebagai akibat dari tingginya nilai pasar atas tanah dan bangunan yang diperjual belikan. Demikian halnya dengan Pajak Penerangan Jalan yang juga ditentukan oleh faktor demografi. Tingginya jumlah penduduk secara langsung akan meningkatkan jumlah pajak penerangan jalan yang diterima karena pajak yang diperhitungkan melekat pada penggunaan tenaga kelistrikan. Daerah-daerah dengan geliat aktivitas perekonomian yang tinggi sekalipun juga menjadikan ketiga jenis pajak ini menjadi kontributor utama.

Mencermati jenis-jenis pajak yang dipungut daerah mau tidak mau harus diakui bahwa pendapatan dari pajak sangat tergantung dari aktivitas ekonomi, khususnya dari sektor penyediaan akomodasi dan makan dan minum serta sektor pertambangan dan penggalian. Sebaliknya, peningkatan pajak daerah bagi daerah yang mengandalkan perekonomian dari sektor pertanian merupakan tantangan yang sulit dicapai.

Hal yang sama juga dapat ditelusuri dari pendapatan dari retribusi daerah. Daerah dengan jumlah penduduk dan karakter perkotaan akan cenderung mendapatkan pendapatan dari retribusi yang lebih tinggi. Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009, retribusi dibagi menjadi tiga, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.



10 Kabupaten/kota Dengan Penduduk Terpadat di Sulsel 2021 (Orang/Km²)

Diolah dari Sulsel Dalam Angka 2022

Retribusi jasa umum merupakan jasa yang diberikan oleh pemda untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Contohnya, pelayanan kesehatan, persampahan, pasar, dan parkir. Berdasarkan hal tersebut, dapat diprediksi bahwa kabupaten/kota dengan karakter perkotaan dan jumlah penduduk yang tinggi cenderung akan mampu mengumpulkan retribusi yang besar. Kota dengan jumlah penduduk dan kepadatan yang sangat tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lain. Kota Makassar, misalnya, dengan jumlah penduduk sebesar 1.427.619 jiwa memiliki potensi lebih besar untuk menggali retribusi daerah dibanding Kabupaten Selayar yang selain berjumlah penduduk terendah di antara kabupaten/kota lain di Sulsel (137.974 jiwa), juga merupakan wilayah kepulauan yang tidak bisa dijangkau dengan jalur darat.

Dengan jumlah penduduk yang besar, permasalahan kesehatan masyarakat juga kompleks karena jumlah penduduk yang menggunakan fasilitas kesehatan juga lebih banyak. Demikian halnya dengan urusan persampahan, di mana penduduk yang besar akan memengaruhi jumlah sampah

yang dihasilkan, yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap retribusi yang berhasil dikumpulkan. Logika yang sama juga berlaku untuk retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu.

Logika yang sama juga berlaku pada dua jenis PAD lainnya, yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Daerah dengan demografi yang tinggi memiliki target pasar yang lebih luas atas produk-produk BUMD. Demikian halnya dengan lain-lain yang sah yang secara umum kontribusi terbesarnya berasal dari jasa giro dan pendapatan BLUD. Jumlah penduduk yang tinggi juga menunjukkan cakupan layanan yang besar.

Epilog

Dengan melihat fakta di atas, apakah mungkin daerah yang mengandalkan pertanian sebagai kontributor terbesar dalam PDRB dapat melakukan lompatan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerahnya? Daerah-daerah tersebut memang memiliki IKF yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan daerah yang diuntungkan dari faktor demografi dan memiliki karakter kota. Namun, perlu diingat pula bahwa kabupaten/kota dengan karakter perdesaan

memiliki kontribusi yang besar dalam mendorong aktivitas perekonomian daerah perkotaan.

Berdasarkan data BPS Sulsel, Kabupaten Toraja Utara, IKF terendah di Sulsel, merupakan daerah penghasil kopi terbesar kedua di Sulsel dengan produksi sebesar 6.726 ribu ton. Demikian halnya dengan Kabupaten Enrekang, IKF terendah kedua, merupakan daerah terbesar pertama penghasil kopi dengan produksi sebesar 8.960 ribu ton. Kemudian, Kabupaten Luwu, IKF kelima terendah, merupakan penyumbang terbesar produksi rumput laut dan penghasil kopi terbesar kedua setelah Kabupaten Luwu Utara. Kabupaten Bone, IKF sebesar 0,0943, adalah kontributor terbesar beras di Sulsel. Kabupaten-kabupaten tersebut tentu membawa dampak perekonomian pada skala regional bahkan nasional. Beberapa daerah malahan sudah melakukan ekspor komoditas unggulannya.

Produksi kopi Toraja Utara dan Enrekang, misalnya, telah dikenal menjadi suguhan kafe-kafe di kota-kota besar. Pemkab Toraja Utara dan Pemkab Enrekang tidak dapat menikmati hasil pertanian dalam bentuk PAD secara langsung karena tidak ada pajak daerah yang dapat langsung dikenakan terhadap hasil pertanian. Sebaliknya, distribusi hasil pertanian kedua kabupaten tersebut memberikan dampak secara langsung terhadap PAD dari pajak restoran di kota-kota besar yang menyajikan kopi asal Toraja Utara dan Enrekang. Demikian halnya dengan beras, sayur-sayuran, buah-buahan, yang menjadi komoditas utama pemda penghasil komoditas pertanian tidak dapat menikmati hasilnya dari pajak daerah dan retribusi daerah. Kota besarlah yang menikmati PAD dari komoditas unggulan daerah.

Jika demikian, haruskah daerah penghasil komoditas pertanian berubah menjadi perkotaan? Kemandirian fiskal daerah seharusnya tidak sekadar dilihat dari sisi keberhasilan daerah dalam memobilisasi pendapatan asli daerah. Namun, keberhasilan pembangunan daerah harus dilihat dengan konteks yang lebih luas. Hasil reviu BPK terhadap indeks kemandirian daerah tidak selayaknya digunakan untuk menghakimi daerah dengan IKF rendah dalam meningkatkan PAD. Seharusnya, hasil tersebut menjadi refleksi dalam melihat secara lebih cermat adanya kesenjangan yang terjadi antar daerah, dan selanjutnya mencari penyebab dan solusinya.

Perbedaan IKF daerah dengan status kota dan kabupaten pun tidak serta merta mengharuskan kabupaten untuk menjadikan dirinya sebagai pusat kegiatan ekonomi sebagai upaya peningkatan kemandirian fiskalnya. Dalam hal ini, kota haruslah tetap berfungsi sebagai pusat perdagangan komoditas unggulan kabupaten di sekitarnya. Adapun kabupaten tetap berfokus mengembangkan dan meningkatkan produk unggulan daerah. Perubahan desa menjadi kota, jika itu terjadi justru, akan menimbulkan permasalahan ketersediaan pangan yang kini mulai dirasakan yang disebabkan oleh maraknya alih fungsi lahan pertanian.

Bagaimana audit internal dalam tren publikasi dunia?

Auditor internal merupakan profesi yang terus bertransformasi. Perannya yang terus berkembang tercatat dalam sejarah publikasi dunia dan didukung oleh berbagai gagasan baru yang dapat meningkatkan nilai tambahnya. Rosy Riani, Auditor Muda pada Biro SDM BPKP, tergelitik untuk menelusuri jejak audit internal sektor publik pada jurnal-jurnal terindeks Scopus dari tahun 1974 hingga saat ini. Bersenjatakan Vosviewer, ia menganalisis dan mengidentifikasi mulai dari gambaran tren publikasi hingga pengarang, subyek area, dan negara terproduktif. Di mana posisi perguruan tinggi Indonesia dalam afiliasinya dengan universitas lain dalam menyusun publikasi terkait audit internal sektor publik juga menjadi bagian yang patut kita perhatikan dalam kajian ini.

Tidak hanya bermanfaat bagi auditor internal, artikel pertama pada kolom ilmiah ini juga dapat menginspirasi akademisi dan peneliti untuk mengeksplorasi dan melakukan studi lebih lanjut terkait peran *value-driver* ini.

Telaahan *Governing Body* pada Sektor Publik

Menyikapi perang Rusia-Ukraina, pemerintah Indonesia bersiap memitigasi risiko inflasi. Keberhasilannya tidak lepas dari implementasi tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan

(*governance, risk management, and compliance/GRC*) yang pada sektor publik diaktualisasikan pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Penerapan GRC akan dinilai menggunakan tiga indeks: Manajemen Risiko Indeks (MRI), Kapabilitas APIP, dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) secara mandiri (*self-assessment*) oleh masing-masing auditor internal organisasi yang kemudian dievaluasi oleh BPKP.

Pada sektor swasta, biasanya ada peran dewan komisaris atau dewan pengawas yang berwenang terhadap tata kelola dengan melakukan pengujian langsung dan atau mendapatkan informasi dari auditor internal sebagai penasihat terpercaya. Lalu, bagaimana dengan sektor publik pada pemerintahan daerah? Siapakah yang layak berperan sebagai *governing body* guna mendapatkan keyakinan terkait implementasi GRC dan keberhasilan program pemerintah?

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Rudy M. Harahap menyajikan hasil observasinya atas praktik pengendalian inflasi di daerah. Dengan membaca artikelnya pada kolom ilmiah, kita akan mendapatkan jawaban atas pertanyaan ini secara komprehensif mengacu pada regulasi, proses bisnis dan tantangan pengendalian inflasi, serta sinerginya dengan auditor internal.

**Pertanyaan:**

Saya akan mengajukan kenaikan pangkat dari III/a ke III/b pada bulan Oktober tahun 2023.

Berdasarkan surat Kepala BPKP KP.02.00/S-985/JF/01/2023 nomor 5 menyatakan bahwa bagi auditor yang akan naik pangkat pada periode bulan Oktober 2023, dibutuhkan penyesuaian angka kredit per 31 Desember 2022 ditambahkan dengan angka kredit hasil konversi predikat kinerja periodik semester 1 tahun 2023.

1. Bagaimana perhitungan untuk formulir perhitungan angka kredit integrasi sesuai form di lampiran peraturan BPKP yang disebutkan di atas?
2. Berapa angka yang harus saya cantumkan pada butir Pengembangan Profesi dan Penunjang ?

Novi Karisma Rurbaroro, S.E

Jawaban:

1. Syarat angka kredit kenaikan pangkat dari III/a ke III/b adalah sebesar 50 dari tugas jabatan. Angka kredit yang digunakan untuk kenaikan pangkat pada bulan Oktober adalah angka kredit s.d 30 Juni 2023, yang merupakan angka kredit per 31 Desember 2022 ditambah dengan penilaian angka kredit konversi predikat kinerja periode 1 s.d 30 Juni 2023. Angka Kredit yang dibawa dari 31 Desember 2022 hanya tugas jabatan, tanpa pengembangan profesi dan penunjang. Sebagaimana sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan PANRB Nomor 1 Tahun 2023, angka kredit untuk kenaikan/jabatan hanya dari tugas jabatan.
2. Sesuai aturan saat ini, tidak ada persyaratan Pengembangan Profesi dan Penunjang untuk kenaikan pangkat/jabatan.

**Salam,
Kapusbin JFA, Iwan Agung Prasetyo**

**Pertanyaan:**

Saya auditor di Inspektorat Daerah, ingin konfirmasi terkait pendaftaran pelatihan madya bulan September 2023. Mengapa pendaftaran pelatihan madya di aplikasi registrasi *online* kode 0418/0419 tidak bisa diinput?

Unit APIP di Wilayah Mandailing**Jawab:**

Terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan kepada kami. Untuk pendaftaran pelatihan madya, silahkan admin unit untuk melakukan pendaftaran ke alamat <https://registrasi.bpkp.go.id/registrasi/> dengan kode pelatihan MD-010 untuk kelas madya dengan metode *blended learning* (*e-learning* dan tatap muka) atau MD-020 untuk kelas madya dengan metode *blended learning* (*e-learning* dan tatap muka jarak jauh).

Sesuai dengan PP PNBPK BPKP Nomor 80 Tahun 2021, Peraturan BPKP Nomor 7 Tahun 2021 dan surat Pusdiklatwas Nomor S-3295/DL/3/2021, biaya pelatihan dan akomodasi untuk jenjang madya sebesar Rp8.049.000,00 (metode *e-learning* dan tatap muka) atau sebesar Rp4.152.000,00 (metode *e-learning* dan pembelajaran jarak jauh).

Salam,
Plt. Kapusdiklatwas, R. Ersi Soenarsih

Pembaca, rubrik ini kami sediakan untuk Anda yang mempunyai masalah dengan Jabatan Fungsional Auditor (JFA), baik seputar aturan-aturan JFA, angka kredit maupun sertifikasinya. Pengasuh rubrik ini adalah Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, Iwan Agung Prasetyo dan Plt. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, R. Ersi Soenarsih. Surat yang Anda layangkan untuk rubrik ini, hendaknya ditujukan ke wartapengawasan@gmail.com atau redaksi **Warta Pengawasan**.

MEMBACA, Sebuah Terapi dan Investasi Diri

Hestia Istiviani,
Duta Baca DKI Jakarta 2023



Lahir pada tahun 1993 di Surabaya, Hestia merupakan lulusan sarjana Ilmu Informasi dan Perpustakaan Universitas Airlangga. Buku menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan hidupnya. Ia memanifestasikan kecintaan tersebut dengan menginisiasi gerakan membaca bersama (*silent book club*) pada tahun 2019 yang dikampanyekan melalui akun @bacabareng.sbc. Selain itu, dara penggemar cerita detektif ini juga aktif berbagi ulasan buku yang dibacanya melalui akun media sosial. Konsistensi Hestia sebagai aktivis literasi

kemudian membawanya sebagai Duta Baca DKI Jakarta 2023.

“Meracuni” masyarakat tentang serunya membaca dan *say no to bookshaming* menjadi visi misi Hestia setahun ke depan. Berbagai program menarik di bidang literasi telah ia giatkan, di antaranya *workshop* mencatat perjalanan membaca (*reading tracker*) dan *Dune Study Group*, kelompok



baca dukungan bagi siapa saja yang ingin menikmati karya Frank Herbert dan Brian Herbert. Penasaran bagaimana kisah cintanya dengan buku berkembang hingga bisa meraih prestasi sebagai ujung tombak kampanye budaya membaca di ibu kota? Mari simak penuturannya kepada redaksi Warta Pengawasan berikut ini.

Bagaimana bisa terpilih sebagai Duta Baca Provinsi DKI Jakarta?

Program Duta Baca baru terbuka untuk umum tahun ini. Sebelumnya, program ini bernama Abang None Buku sebagai bagian dari Abang None Jakarta. Tahun ini, Duta Baca jadi program tersendiri, bukan Abang None. Yang mengadakan seleksi Duta Baca adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. Selain *open for public* juga ada *range* usianya, yaitu 17-35 tahun dan tidak harus ber-KTP DKI. Tapi memang harus berdomisili di DKI. Aku ikuti semua aturannya, ada esai, dan administrasi lain yang harus dilengkapi. Jadi itu berjenjang, setelah seleksi administrasi lolos, naik ke seleksi tes tulis (wawasan tentang aturan perpustakaan, minat baca di Indonesia). Setelah lulus tes tulis, baru

naik ke tes esai “Andaikan terpilih jadi Duta Baca itu mau *ngapain?*,” kurang lebih begitu. Lulus esai, baru deh wawancara. Dari wawancara secara tatap muka dengan enam juri, beberapa hari kemudian udah ada pengumuman duta baca terpilih.

Cukup panjang juga ya tahapan seleksinya. Hestia sendiri kapan pertama kali berkenalan dengan buku hingga akhirnya terbangun kebiasaan membaca?

Aku dibesarkan oleh kedua orang tua yang memang sudah gemar membaca. Ayahku cukup aktif dalam kegiatan baca-membaca, bisa dibilang beliau ini seorang kutu buku ya istilahnya. Ibuku juga suka *banget* membaca. Jadi aku terbiasa melihat kegiatan membaca sebagai bagian dari aktivitas kami sehari-hari.

Salah satu kebiasaan yang sampai sekarang membentuk aku adalah membaca ketika istirahat di rumah sepulang sekolah karena waktu kecil *channel* TV/kanal hiburan enggak sebanyak sekarang. Ada batasan penggunaan TV di malam hari. Baca pun mengikuti ketersediaan bacaan. Ayah biasanya *lanjutin* baca koran pagi yang belum selesai dibacanya. Mamaku baca tabloid-tabloid langganan. Orang tua juga kasih fasilitas bacaan dengan langganan majalah Bobo dan berbagai macam buku anak, seperti buku kumpulan cerita rakyat yang berwarna dan bergambar. Dari situ jadinya

dalam kepala ketika kecil, membaca itu adalah sesuatu yang normal atau aktivitas yang memang sewajarnya dilakukan. Baru setelah kuliah merantau ke Jakarta, dapat kerjaan pertama kali pun aku berada di lingkungan yang “menuntut” untuk baca banyak referensi. Pekerjaanku ketika itu salah satunya melakukan riset, membuat *report*. Dari rangkaian kejadian itu, aku merasa beruntung “kecanduan” membaca sampai sekarang.

Lalu, adakah genre khusus yang jadi favorit?

Aku merasa, aku bertemu dengan bacaan. Waktu kecil dengan cerita rakyat, lalu waktu SD, uang sakuku kuhabiskan untuk rental komik. Mama yang liat uang sakuku habis untuk rental komik, alih-alih ditabung, merasa sayang juga kalau dihabiskan untuk itu. Jadi ketika kelas 5, beliau coba ngasih aku novel Agatha Christie. Nah itu awal mula aku jadi punya *genre* favorit, yaitu detektif. Waktu beranjak dewasa, ternyata aku juga bertumbuh dan berkembang dengan genre bacaan. Pas kuliah aku masih baca-baca novel, tapi novelnya mulai lebih tebal. Ketika kuliah, akses ke perpustakaan kampus juga punya variasi bacaan fiksi yang banyak. Jadi aku memanfaatkan akses kartu perpustakaan untuk pinjam buku-buku di sana. Masuk ke dunia kerja, agak kaget karena harus banyak baca buku-buku nonfiksi yang sebelumnya jarang kusentuh. Eh ternyata aku merasa nyaman. Di situ aku tersadar ternyata buku *self-help* itu seru ya, ternyata buku-buku tentang ekonomi, bisnis, *marketing* itu menyenangkan juga. Akhirnya sekarang aku sampai ke *self-help*, psikologi populer, sains populer, terus juga buku-buku soal ilmu sosial itu aku juga baca. Kalau dibilang *genre* favorit, sampai sekarang *genre* ku masih detektif itu tadi. Tapi, lagi suka mendalami apa, belakangan ini aku lagi suka membaca buku-buku yang membahas isu-isu sosial.

Menarik ya diversifikasi bacaannya, kami jadi penasaran... Apakah kebiasaan membaca membantumu dalam karir dan kehidupan sehari-hari?

Bantu banget. Tapi, **yang sering orang pikir adalah membaca buku itu *return on investment*-nya cepat. Padahal enggak kayak gitu. Aku baru merasakan apa yang kubaca itu mempengaruhi cara berpikir, mengambil keputusan, belakangan ini setelah aku mengalami pertumbuhan *genre* bacaan.** Aku menyimpulkannya begini, semakin aku baca, semakin aku sadar aku tidak tahu apa-apa. Memang betul apa kata pepatah, “Padi semakin berisi semakin merunduk.” Karena *the more I read, the more I understand*, ilmu itu luas banget. Aku cuma tahu sekecil itu *doang*. Minimal aku enggak boleh sok tahu, harus *humble*, harus mau mendengarkan. Itu yang benar-benar aku dapatkan dari membaca. Selain itu, berpengaruh juga terhadap caraku berkomunikasi dengan orang lain.

Dari pengalaman itu, buku apa yang paling “life-changing”?

Ada satu, judulnya “*Think Again*”. Ini bukunya Adam Grant. Aku *discover* buku itu pas terbit dan di situ aku mulai refleksi ke diri aku sendiri. Apakah aku ini orangnya keras kepala sehingga enggak mau dengerin pendapat dari orang lain? Atau jangan-jangan aku terlalu jadi “kaleng



yang terbuka”, *masuk-masukin* aja semua pendapat orang lain sampai aku enggak punya opini sendiri. Ini yang mendorong aku untuk membiasakan diri mencerna informasi/ pendapat orang lain, dicerna dulu, baru berkomentar.

Selain itu, buku “1984”-nya George Orwell. Itu buku klasik, distopia. Aku udah baca beberapa kali dan membuka mataku bahwa ketika ada sebuah kekuasaan yang sudah amat otoriter di sebuah negara, kita sebagai warga negara hanya dilihat sebagai angka atau pion-pion untuk mengantarkannya pada tujuan penguasa tersebut. Itu cukup *bikin* ngeri.

Baik, nah kalau tadi kan dampak membaca secara pribadi. Sekarang menurutmu untuk lingkungan kantor seberapa *impactful* sih kebiasaan membaca pegawai bagi organisasi dan pengembangan kompetensinya? Perlukah dibangun klub buku?

Satu hal yang perlu dipahami, ketika *ngomongin* soal klub buku itu ada banyak banget metode, pendekatan, model-

modelnya. Kalau yang aku pribadi coba kampanyekan melalui akunku atau akun @bacabareng. sbc adalah membiarkan orang-orang berkenalan dulu bahwa baca itu menyenangkan dan pintu untuk suka baca itu banyak banget. Begitu orang-orang jadi suka baca, mereka akan *explore another thing*, entah genre-nya, entah baca dari penulis yang sama, dia akan *explore* banyak hal dari situ. Karena sekalnya mereka suka, mereka akan mulai belajar menjadi pembelajar yang mandiri. Jadi *curiosity*-nya kebangun.

Jika ini ada di sebuah lembaga, seperti kantor, sekolah,



organisasi, *maintain*-nya enggak bisa pakai target harus baca sekian buku. Setiap orang punya kebiasaan baca yang berbeda-beda, kecepatan yang beda, dan setiap orang punya pengalaman baca yang beda pula. Sesuatu yang secara kuantitas ditentukan, nantinya akan jadi beban. Pendekatanku adalah untuk membuat membaca sebagai aktivitas yang membahagiakan.

Jadi, untuk di kantor, bisa dicoba yang tidak tematik. Jadi betul-betul *silent reading* aja. *Ngumpul*in orang, baca, bisa 30-60 menit duduk bareng untuk baca apapun yang mereka ingin baca, mau itu komik, katalog, buku teks kuliah atau apapun yang ingin mereka baca. Lalu 30 menit selanjutnya, kita coba cek. Diskusinya bukan soal baca buku apa, melainkan "*How do you feel after you read?*" Enak gak? Apakah ada sesuatu yang kamu rasakan? Dengan cara seperti itu kita sama-sama menyadari bahwa 30 menit buat baca dalam senyap bareng-bareng itu menenangkan sekali, *therapeutic*. Dari situ mungkin kita bisa bangun bareng-bareng untuk mengadakan kembali kegiatan tersebut. Balik lagi, tentu dengan *return on investment* yang enggak instan. Kalau kita berharap ada *upskilling* yang signifikan pada pegawai/siswa. Tapi dengan kita *at least check up on them*, bagaimana emosi mereka setelah membaca, aku harap mereka akan menyadari bahwa membaca itu menyenangkan.

Sebagai inisiator baca bareng, ada tips untuk bangun klub buku di kantor?

Pertama, aku selalu bilang sama teman-teman, kalau mau buat klub buku itu yang dilihat tenaga yang kita punya. Bagaimanapun juga ketika kita berdedikasi untuk bikin klub, apakah kita bisa ngerjain sendirian atau butuh orang lain. Kedua, mau *ngapain*? Apakah mau baca senyap bareng-bareng aja atau ada diskusinya, juga ditentukan. Dari penentuan aktivitas itu, kita bisa memetakan berapa

banyak sumber daya yang kita butuhkan dan frekuensinya. Lalu, kalau misalnya mau *offline* atau *online* akan seperti apa teknisnya. Yang selalu aku tekankan juga adalah coba amati dulu bagaimana sih kebiasaan orang-orang di *circle* atau organisasi. Jangan sampai *plek ketiplek* niruin baca bareng eh ternyata enggak guna nih di kantor karena *culture*-nya berbeda. Kalau kita udah riset dulu, *ngamatin*, kita bisa *customize* itu. Jangan mentah-mentah adopsi, setidaknya bisa dimodifikasi dari yang sudah ada.

Setelah klub buku, sekarang gimana ya untuk memulai kebiasaan membaca di tengah kesibukan bekerja?

Choose anything that you want to read. Enggak perlu *ngikutin* tren yang ada. Misal, ingin baca komik masa kecil, ingin baca Bobo ya baca aja. *Feel the connection first* dari hal-hal yang ingin kita baca. Lalu, biasakan melalui hal-hal kecil. Enggak apa-apa cuma lima menit sehari, sepuluh menit sehari, tapi kita coba dulu untuk bangun kebiasaannya secara rutin. Cuma bisa lima halaman sehari, juga enggak apa-apa. Coba dari hal-hal yang mudah, yang gampang kita akses. Kalau memungkinkan, bisa coba follow akun-akun yang sering *posting* soal buku. Tujuannya bukan untuk *bikin minder* atau terintimidasi, tapi untuk membiasakan diri melihat aktivitas baca. Bisa jadi kita selama ini merasa jauh dari aktivitas membaca karena di sekitar kita memang enggak ada



yang baca sehingga kita enggak terpapar sama kebiasaan membaca.

Wah terima kasih untuk tips-tips-nya! Sekarang rekomendasiin dong buku yang menurut Hestia wajib dibaca oleh setiap orang?

Ada dua buku yang menarik. Yang pertama judulnya "You Do You"-nya Fellexandro Ruby. Yang kedua itu judulnya "Menjadi", bukunya Afutami. Kebetulan dua-duanya nonfiksi dan *self-help*. Tapi buatku yang udah pernah bekerja selama delapan tahun, membaca kedua buku itu kayak merasa, "Coba ini kubaca pas baru lulus kuliah," begitu. Mungkin akan lebih terstruktur cara berpikirku, pengambilan keputusanku. *Somehow* aku merasa mendapat banyak *insight* dari buku-

buku itu. Tapi ya seperti yang tadi dibicarakan, setelah baca kedua buku ini jangan berharap langsung dapat manfaat, mungkin bisa nanti entah lima tahun lagi. Tapi *at least* ketika kita udah baca, kita mendapat sebuah wawasan baru, cara pandang baru, yang aku harap bisa membantu kita di kehidupan.

Untuk menutup diskusi inspiratif ini, kami mau ajak Hestia berimajinasi. Kalau bisa bertemu dengan salah satu penulis, ingin bertemu siapa? Apa yang mau ditanyakan?

Ada jurnalis dari luar, namanya Naomi Klein. Dia adalah jurnalis dari Kanada yang memang khusus meliput soal krisis iklim. Buku-bukunya itu *depressing*, dalam artian dia benar-benar memperlihatkan fakta bahwa bumi itu *dying*. Berbagai pihak, seperti perusahaan, industri besar, mengeruk tanpa memikirkan dampak ke jangka panjangnya. Aku berharap *banget* suatu ketika bisa ketemu dia untuk nanya, "Kok bisa seberani ini sih buat ngebongkar yang ada di belakang perusahaan-perusahaan besar itu? Apakah gak ngerasa takut?." Aku kagum banget dengan cara dia nge-*report*, bikin buku, bikin laporan jurnalistik terkait bocornya pipa minyak yang akhirnya bikin satu lautan terkontaminasi, sumber air dari negara mana jadi terkontaminasi, itu betul-betul berani *banget*.

(Nadia Khaerunnisa)

AUDIT KINERJA

sebagai Alat Evaluasi Kebijakan Publik



Kebijakan publik adalah respons pemerintah melalui sistem politik dan birokrasi untuk memecahkan permasalahan di masyarakat. Dalam hal ini, kebijakan publik yang dirumuskan dan dilaksanakan oleh pemerintah akan menentukan hitam-putih dan arah negara. Pentingnya kebijakan publik inilah yang kemudian menuntut dilakukannya perumusan dan pelaksanaan hingga evaluasi kebijakan publik dengan baik. Lalu, bagaimana memastikan bahwa kegiatan-kegiatan dalam siklus kebijakan publik tersebut memang telah dilakukan dengan maksimal?

Salah satu *tool* utama untuk memastikan hal tersebut adalah melalui kegiatan audit, yang dalam hal ini berupa aktivitas

audit kinerja kebijakan publik. Audit kinerja kebijakan publik, dengan berbagai macam teknik audit yang ada di dalamnya, akan dapat memberikan penjaminan memadai mengenai apakah kebijakan publik telah disusun, dilaksanakan, dan dievaluasi dengan baik. Audit kinerja kebijakan publik akan menjadi dasar bagi auditor untuk memberikan rekomendasi kebijakan publik yang lebih baik.

Paradigma lembaga audit pada saat ini bukan lagi pada bagaimana mencari kesalahan dan penyimpangan, tetapi lebih pada bagaimana dapat memberikan nilai tambah kepada auditan. Bagaimana auditor dapat memberikan rekomendasi dan mendorong terwujudnya perbaikan-perbaikan yang akan

dapat meningkatkan kinerja organisasi yang diaudit, baik di masa kini maupun di masa datang (bersifat futuristik/*foresight*).

Paradigma tersebut dapat dicapai melalui fungsi pengawasan sebagai agen perubahan (*agent of change*) dan konsultan yang terpercaya (*trusted advisor*) dengan karakteristik sebagai lembaga yang memiliki kompetensi individual dan kompetensi organisasional yang dibutuhkan oleh lembaga pemerintah lain, serta memiliki integritas yang tinggi (*trustworthy*).

Inilah bentuk pengawasan intern pemerintah yang melintasi ruang dan waktu. Ketika lembaga pengawasan intern pemerintah mampu untuk memberikan rekomendasi yang bersifat futuristik kepada organisasi pemerintah yang menjadi rekan

kerjanya (auditan), seiring dengan fungsi lembaga pengawasan intern sebagai agen perubahan dan konsultan terpercaya bagi lembaga-lembaga pemerintah, dengan berbagai macam jasa pengawasan yang diberikan.

Buku ini mampu memberikan penjelasan mengenai metodologi audit kinerja kebijakan publik, baik berupa audit tahap perencanaan kebijakan publik, audit tahap pelaksanaan kebijakan publik dan audit tahap evaluasi kebijakan publik dalam bingkai *ex ante audit*, *in medias res audit* dan *ex post audit*.

Buku ini sangat perlu dibaca oleh auditor, analis kebijakan publik, pemerhati kebijakan publik, mahasiswa akuntansi, mahasiswa administrasi publik dan pihak-pihak yang memiliki minat untuk mempelajari mengenai audit dan kebijakan publik.

Judul:

Audit Kinerja Kebijakan Publik
– Pengawasan Publik yang Menembus Ruang dan Waktu untuk Mendorong Peningkatan Kinerja Kebijakan Pemerintah dalam Mewujudkan *World Class Government*

Penulis:

**Ardeno Kurniawan S.E.,
M.Acc., Ak. dan Iwan Novarian
Sutawijaya, SE. M.Ak. CA.
CPSAK. CNLP. LCCC. Ak.**

Penerbit:

Andi Offset dan BPFE UGM



Halaman:

242 halaman

Kategori:

Ilmiah

Dua Hari Menuju Dewasa



Apa kenangan paling membekas dari masa remaja Anda? Bagi Gordie, jawabannya adalah saat ia bersama tiga sahabatnya jauh-jauh berjalan kaki demi melihat orang mati. Pada mulanya, temannya Vern (Jerry O'Connell) tak sengaja mendengar kakaknya membicarakan lokasi penemuan jenazah seorang anak. Ray Brower, anak malang itu, memang telah beberapa hari diberitakan menghilang. Ia pun membawa berita tersebut pada ketiga kawannya, Chris (River Phoenix), Gordie (Wil Wheaton), dan Teddy (Corey Feldman). Terbayang akan eksposur dan popularitas yang akan mereka dapatkan jika bisa mengklaim diri sebagai penemu jenazah tersebut, mereka pun

merencanakan perjalanan selama dua hari. Kebetulan pula, esok harinya bertepatan dengan libur Hari Buruh. Jadilah empat sekawan itu berangkat menyusuri rel kereta api dan menembus hutan. Petualangan mereka ini pada akhirnya memanifestasikan pepatah, *"It's not the destination, it's the journey"*. Sebab, perjalanan mereka lah yang ternyata penting, bukan tujuan akhirnya.

Film ini sering disebut sebagai salah satu film klasik untuk genre *coming of age*. Ceritanya diadaptasi dari novela karangan penulis terkenal Stephen King yang berjudul *"The Body"*. Konon Stephen King sendiri pernah mengakui bahwa film ini adalah adaptasi terbaik dari karyanya. Tentunya, penonton dapat

melihat sendiri bagaimana keempat remaja tanggung ini mampu membawakan karakternya masing-masing dengan apik. Keresahan Gordie dapat ditampilkan oleh Wil Wheaton tanpa terkesan dipaksakan. Hal ini juga diimbangi oleh cemerlangnya River Phoenix. Bahkan, beberapa adegan dan dialog dari karakter Gordie dan Chris akan membekas di hati penonton.

Menonton film ini rasanya seperti tengah menaiki *roller coaster* perasaan. Ada bagian-bagian yang menggelitik, menegangkan, mengharukan, hingga memunculkan perasaan marah. Dialog dan tingkah empat sekawan ini bisa jadi terasa familiar dengan memori masa remaja anak lelaki kebanyakan. Mulai dari bergulat, saling meledek, hingga berdebat masalah sepele. Kita pun dibawa mengenang, kapan dan dengan siapa kita pernah sembunyi-sembunyi merokok, membicarakan perempuan atau berbicara dari hati ke hati mengenai masalah-masalah hidup.

Hal-hal tersebut membuat kita merasa terhubung dengan empat sekawan ini. Kita semua pasti memiliki memori masa remaja dengan para sahabat yang membekas hingga dewasa. Meski kita bisa saja kehilangan kontak dengan mereka, kita tetap ingin menyimak kabar mereka dari jauh. Eratnya persahabatan juga

membuat kita mudah berempati ketika mendengar kabar baik ataupun buruk tentang mereka. Kondisi ini rasanya jarang kita temui di usia dewasa. Gordie dewasa pun menggambarkan situasi ini dengan pas. *"I never had any friends later on like the ones I had when I was 12. Jesus, does anyone?"*, demikian tulisnya saat mengakhiri cerita ini.

(Gilang R. Hastanto)



Judul: **Stand by Me**

Waktu Rilis: **Agustus 1986**

Sutradara: **Rob Reiner**

Penulis Naskah: **Bruce A. Evans, Raynold Gideon**

Berdasarkan Cerita: **The Body**, karya **Stephen King**

Produser: **Bruce A. Evans, Raynold Gideon, Andrew Scheinman**

Pemain: **Wil Wheaton, River Phoenix, Corey Feldman, Jerry O'Connell, Kiefer Sutherland**

Sinematografi: **Thomas Del Ruth**

Musik: **Jack Nitzsche**

Editor: **Robert Leighton**

Durasi: **89 menit**

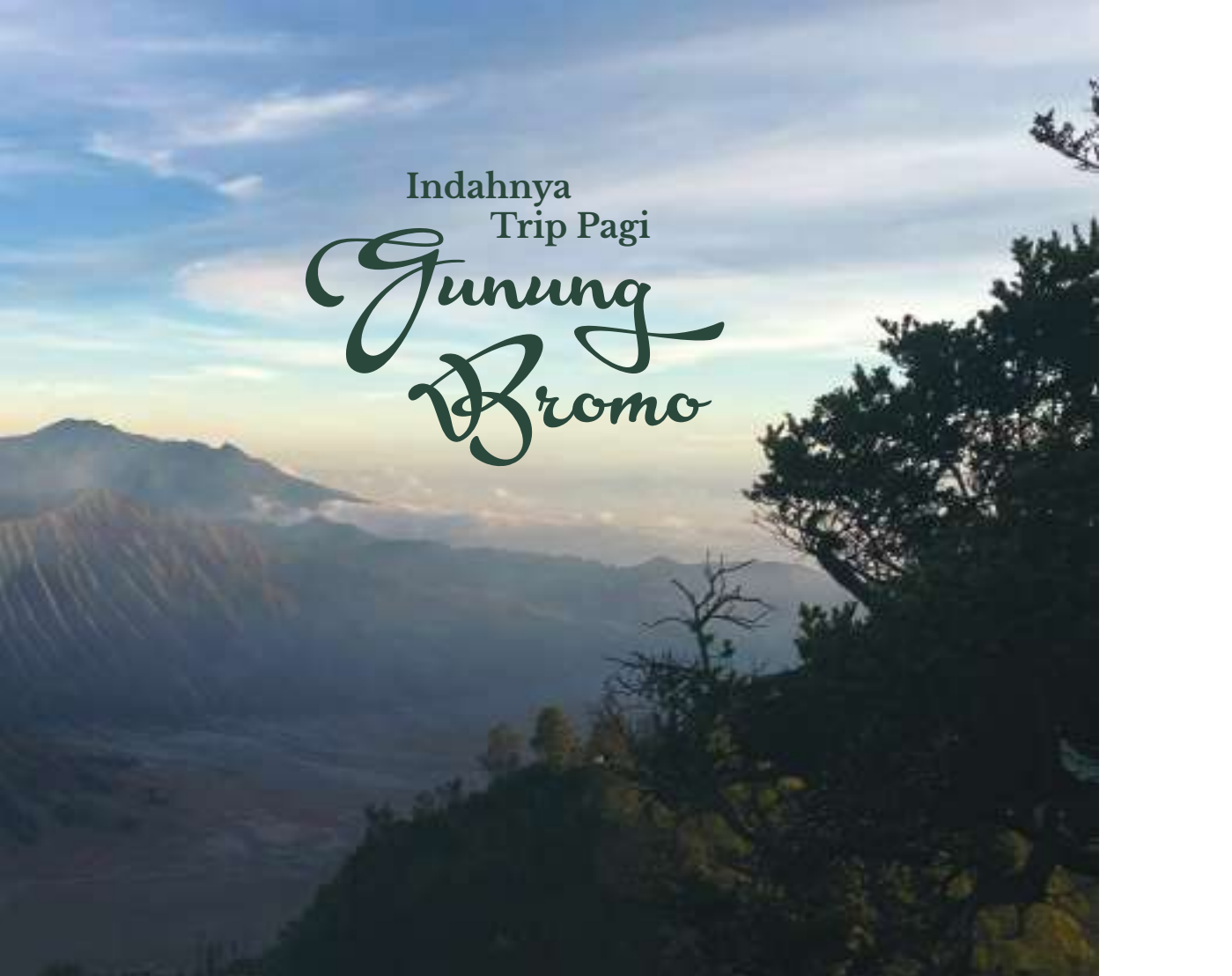
Negara Asal: **Amerika Serikat**



Setelah seminggu berlutat dengan hiruk pikuk perkotaan dan padatnya pekerjaan, tidak ada salahnya kita merencanakan liburan untuk menyegarkan pikiran. Gunung Bromo bisa menjadi salah satu *bucket list* destinasi bagi pembaca untuk menikmati wisata pegunungan di Indonesia. Gunung Bromo punya banyak tempat yang memanjakan mata, mulai dari *sunrise*, ekspedisi hamparan padang pasir menggunakan mobil Jeep, hingga wisata sejarah Pura Luhur

Poten. Pada artikel ini, penulis akan membagikan pengalaman satu hari menikmati keindahan Gunung Bromo, yuk disimak!

Gunung Bromo atau dalam Bahasa Tengger dieja “Brama” adalah salah satu gunung berapi aktif yang menjadi destinasi wisata di Jawa Timur. Gunung yang berasal dari nama dewa dalam agama Hindu, yaitu Brahma, ini memiliki ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan berada dalam empat wilayah kabupaten, yakni



Indahnya Trip Pagi Gunung Bromo

Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Malang. Jika pembaca berniat untuk menikmati keindahan Gunung Bromo, penulis sarankan untuk mencari penginapan di sekitar sana untuk beristirahat sebelum memulai untuk menikmati matahari terbit. Ada banyak *homestay* dan juga hotel yang bisa disewa sesuai *budget* yang disediakan.

Di Bromo, kita wajib bangun pagi supaya bisa menikmati keindahan terbitnya matahari di sini. Sekitar pukul 03.00 dini hari,

wisatawan dapat menyewa mobil Jeep menuju lokasi terbaik untuk menikmati *sunrise*. Ada tiga titik yang direkomendasikan, yaitu Bukit Cinta (*love hill*), Bukit Perahu (prau), dan juga Pananjakan 1 Bromo. Penulis menyarankan untuk memilih Bukit Prau, walaupun akses untuk menuju sana terbilang cukup terjal dibandingkan dengan kedua bukit lainnya. Tetapi, pemandangan yang disajikan merupakan yang terbaik dari ketiga titik tersebut. Jangan lupa pakai jaket yang tebal, sarung tangan, syal, juga



Foto
KOMINFO
BPKP

pelindung kepala, seperti kupluk agar tidak kedinginan, karena udara dini hari di sana dinginnya cukup menusuk.

Setelah menikmati indahnya *sunrise*, wisatawan dapat lanjut menikmati indahnya hamparan lautan pasir di sekitaran Gunung Bromo. Di sini kalian bisa mengabadikan momen-momen indah, menyewa kuda mengelilingi sekitaran lautan pasir, dan juga bisa mengunjungi Pura Luhur Poten. Jika beruntung, wisatawan bisa menyaksikan Suku Tengger yang sedang melakukan ibadah di pura tersebut, salah satunya Upacara Yadya Kasada yang berlangsung antara bulan Juli dan Agustus. Selain itu, bisa juga menanjak menuju puncak Gunung Bromo untuk melihat kawah yang ada di tengah gunung tersebut. Jalur yang tidak terlalu curam dan terdapat kurang lebih 250 anak

tangga ini sangat membantu bagi tua-muda yang ingin “muncak” ke Gunung Bromo.

Sebagai alternatif, wisatawan boleh mengikuti paket tur bersama dengan keluarga atau teman-teman yang disediakan oleh beberapa agen wisata. *Solo traveling* juga bisa jadi pilihan, tentu dengan biaya yang lebih besar. Di samping perlengkapan pakaian, persiapkan pula amunisi untuk mengabadikan momen terindah. Untuk memudahkan sewa Jeep, wisatawan bisa menghubungi langsung agen travel atau pihak penginapan yang biasanya sudah bekerja sama dengan penyedia Jeep di sekitaran Gunung Bromo.

Tunggu apa lagi? Segera agendakan wisata Gunung Bromo.

(Bintang A. Marta)

Teka Teki Sobwas



Mendatar

1. Labelling (artinya)
2. Tidak sesuai dengan peraturan hukum/ perundang-undangan
3. Aset yang tidak berwujud dalam organisasi
5. Proses pencabutan atau pengurangan regulasi negara
6. Pemangku kepentingan (bahasa Inggris)
10. Inheren (sinonim)

Menurun

1. Pengutamaan (sinonim)
2. Proses memasukkan barang dari negara lain ke dalam negeri
4. Perkiraan (sinonim)
7. Tingkat komponen Dalam Negeri
8. Sesuatu tidak stabil dan berbahaya yang memengaruhi individu, kelompok, atau masyarakat
9. Impact (bahasa Inggris)

Ketentuan Cara Menjawab:

1. Tulis jawaban di halaman TTS atau di selembar kertas
2. Foto/scan jawaban
3. Kirim jawaban ke wartapengawasan@gmail.com dengan subjek: Jawaban Teka Teki Sobwas 2/2023
4. Cantumkan Nama Lengkap, Nomor Telepon, Alamat Lengkap, dan Instansi>Nama Kampus (jika ASN/Mahasiswa)

Batas pengiriman jawaban TTS: 30 September 2023

Pemenang terpilih akan mendapat hadiah menarik dan diumumkan di Majalah Warta Pengawasan Edisi 3/2023.

Pemenang TTS WP 1/2023:

1. Rafly Nur Faizi, Bekasi
2. Reza Ferdiansyah, Jakarta
3. Angga Yanuar T., Jakarta



02

REFLEKSI EMPAT DEKADE AUDIT INTERNAL

Oleh: Rosy Riani Kusuma

12

SERI KEPEMIMPINAN GRC: GOVERNING BODY PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH

Oleh: Rudy M. Harahap

REFLEKSI EMPAT DEKADE AUDIT INTERNAL

Rosy Riani Kusuma

Auditor Madya pada Biro SDM BPKP (*Re-Entry*)

BPKP telah melakukan pengawalan terhadap keuangan dan pembangunan Indonesia selama empat dekade. Perjalanan dan transformasi panjang telah dilalui dengan berbagai tantangan. Sebagai Pembina Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, BPKP menjadi panutan bagi auditor internal di Indonesia dan telah berhasil membuktikan keberadaannya sebagai auditor internal yang mumpuni. Namun demikian, bagaimana diskusi terkait auditor internal dari kacamata akademisi dunia, khususnya pada sektor publik?

Tulisan ini akan membahas publikasi-publikasi akade-

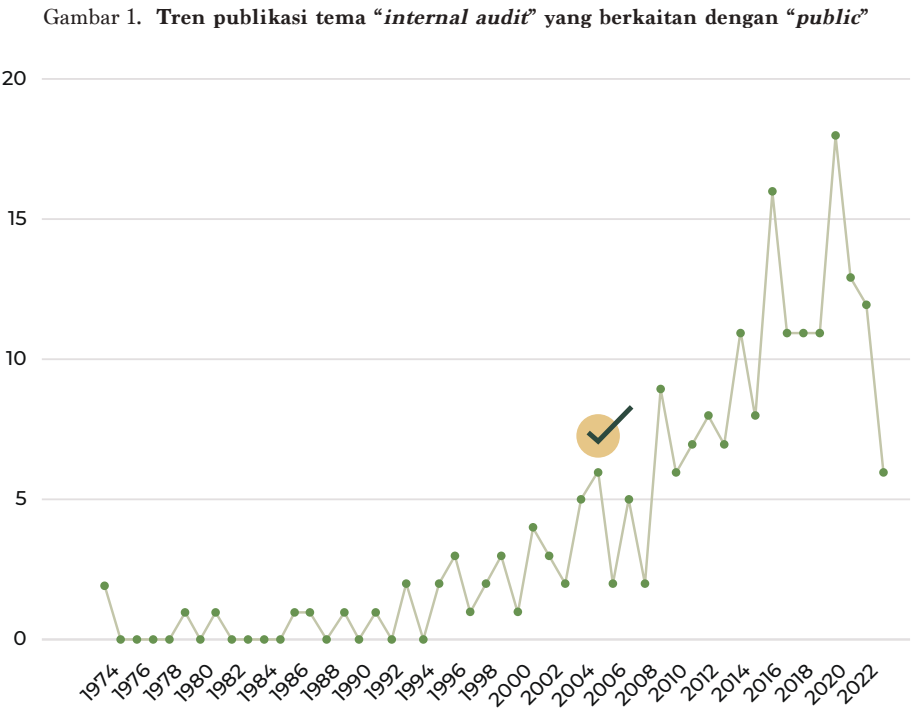
misi dunia pada jurnal-jurnal terindeks Scopus dari tahun 1974 sampai dengan saat ini, untuk memberikan gambaran tren publikasi, pengarang terproduktif, subyek area terproduktif, negara terproduktif, afiliasi terbanyak dan melihat klaster-klaster topik terkait auditor internal dan kaitannya dengan publik. Analisis dilakukan dengan statistik sederhana dan analisis *co-occurrence* dengan menggunakan *software* Vosviewer. *Database* berasal dari Scopus yang diakses pada tanggal 1 April 2023 pada pencarian judul publikasi, abstrak dan kata kunci yang menggunakan kata/tema '*internal auditor*' dan '*public*'.

1. Tren Publikasi Dunia

Dataset Scopus yang diakses pada 1 April menghasilkan 205 publikasi yang terkait dengan kata kunci ‘*internal auditor*’ dan ‘*public*’, dengan publikasi terlama di tahun 1974 dengan dua artikel dan publikasi terbaru di tahun 2023 dengan enam artikel. Tren dengan tema ini mengalami stagnasi dalam dua dekade dan baru mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2004 mencapai total lima publikasi, sebagaimana terlihat pada Gambar 1.

Publikasi di tahun 1974 berjudul “*Qualified auditor can help reduce construction costs*” dengan pengarang Mencotti J.V. diterbitkan

pada jurnal “*Hospital Financial Management*” dan artikel dengan judul “*The professional internal auditor: Fact or fantasy?*” dengan pengarang Morton, J.G., yang diterbitkan dalam Jurnal “*Internal Auditor*”. Artikel pertama membahas mengenai peran auditor internal yang dengan pengetahuannya tentang pengendalian, proses bisnis dan akuntansi, diharapkan dapat membantu pengurangan biaya konstruksi rumah sakit. Kemudian, artikel kedua menyoroti mengenai pengakuan profesionalisme auditor internal dari manajemen perusahaan, komunitas bisnis, akademisi dan masyarakat pada umumnya. Dari kondisi



Tabel 1. Publikasi Chambers, A.D. terkait auditor internal

No	Judul Publikasi & Tahun	Nama Jurnal
1	The board's black hole-Filling their assurance vacuum: Can internal audit rise to the challenge? (A. Chambers, 2008)	Measuring Business Excellence
2	A new vision for internal audit (Andrew D. Chambers & Marjan Odar, 2015)	Managerial Auditing Journal
3	New guidance on internal audit-an analysis and appraisal of recent developments (A. D. Chambers, 2014)	Managerial Auditing Journal

tersebut terlihat bahwa publika-
si terkait tema internal auditor
mengalami peningkatan tajam
dalam dua dekade terakhir.

2. Pengarang Publikasi Dunia
Terproduktif

Chambers, A.D. merupakan
pengarang terproduktif untuk
artikel, buku dan publikasi lain
yang terkait dengan auditor inter-
nal dalam kurun waktu 10 tahun
terakhir. Bagi seorang auditor pe-
merintah, nama Chambers terasa
familiar. Beberapa karyanya men-
jadi referensi dalam modul-modul
pelatihan jabatan fungsional au-
ditor (JFA), sebagaimana terlihat
pada Tabel 1.

3. Area Subyek/Bidang
Terproduktif

Sementara Bidang *Business*,
Management, dan *Accounting* me-
rupakan area subyek terproduk-
tif yang menghasilkan publikasi
terkait auditor internal dan ka-
itannya dengan publik. Sebanyak
34,4% dari seluruh publikasi ter-

kait topik ini dihasilkan dari bi-
dang ini. “*Economics, Econometrics
and Science*” serta bidang “*Social
Science*” menjadi peringkat 2 dan
3 terproduktif dengan 24,5% dan
13%, sebagaimana terlihat dalam
Gambar 2.

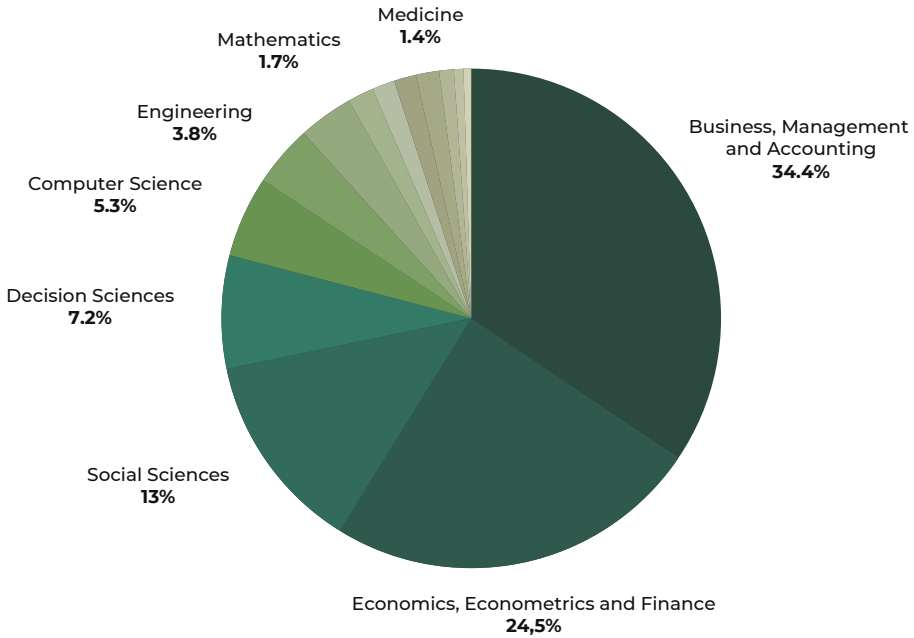
4. Negara Terproduktif

Amerika Serikat, Malay-
sia, dan Indonesia menjadi ne-
gara-negara yang paling produktif
dalam mempublikasikan doku-
men/artikel/buku yang terkait de-
ngan “*internal auditing*” dan “*public*”,
masing-masing dengan 45, 32 dan
20 artikel. Inggris merupakan
satu-satunya negara Eropa yang
berada dalam peringkat sepuluh
besar negara terproduktif.

5. Peringkat Afiliasi

Peringkat 10 besar afliasi ter-
banyak didominasi oleh universi-
tas-universitas Malaysia. Semen-
tara Universitas Bina Nusantara
dari Indonesia, merupakan uni-
versitas di Indonesia dengan afi-
liasi terbanyak untuk publikasi

Gambar 2. Subyek Terproduktif



terkait “*internal auditor*” dengan tiga dokumen dan disusul oleh Universitas Indonesia, Universitas Diponegoro, dan Universitas Padjadjaran, masing-masing dengan dua dokumen, sebagaimana terlihat dalam Gambar 3.

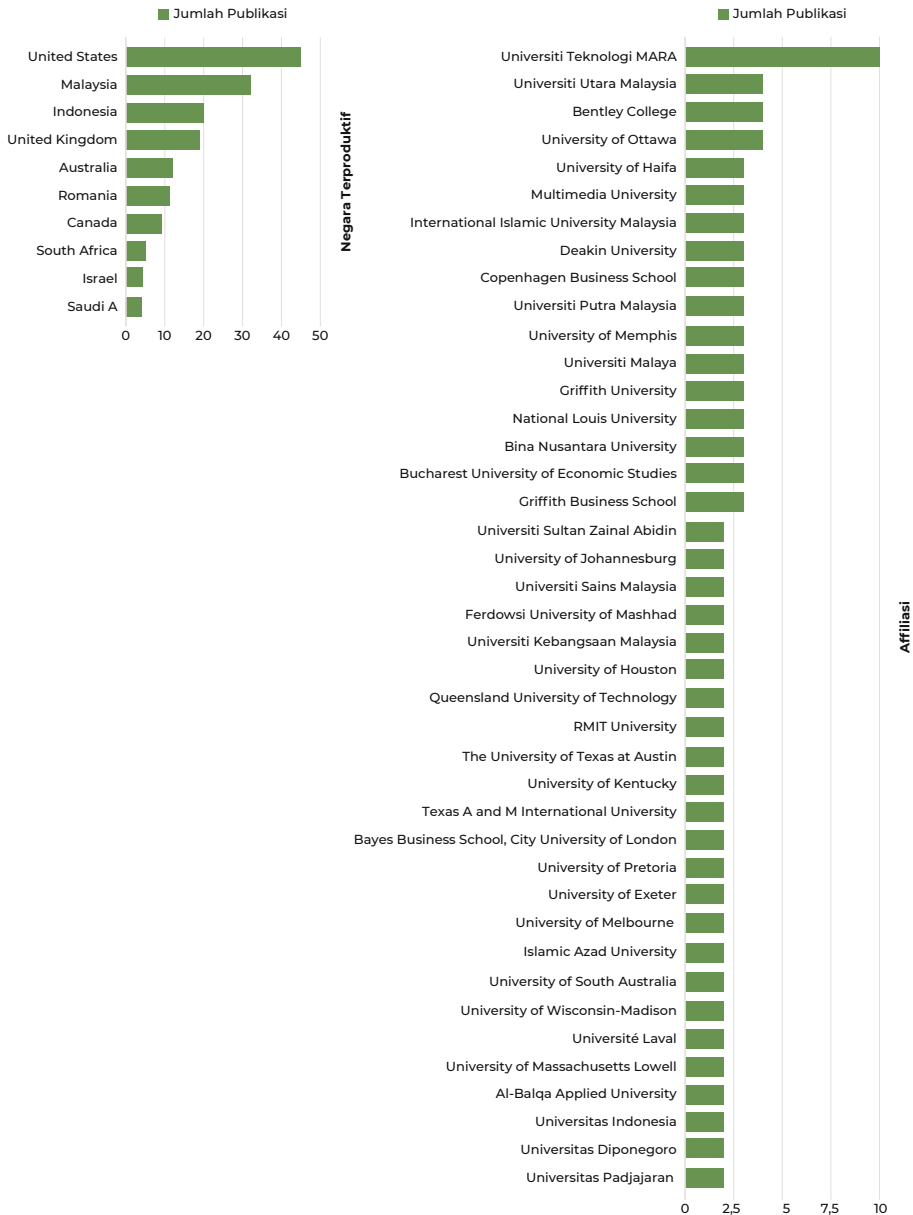
Apabila kita bandingkan, meskipun Indonesia menjadi peringkat tiga dalam negara terproduktif dalam publikasi, namun dalam afiliasi, universitas-universitas di Indonesia belum banyak melakukan kerja sama dengan universitas lain di dunia dalam menyusun publikasi yang terkait dengan “*internal auditor*” dan “*public*”. Hal ini berkebalikan dengan Malaysia yang memiliki peringkat kedua terproduktif

dan peringkat pertama dalam hal berafiliasi dengan universitas lain.

6. Analisis Klaster dengan *Co-Occurrence*

Software Vosviewer menghasilkan *Bibliometric* dan menampilkan hasil analisis *co-occurrence* dengan melakukan analisis keterkaitan kata kunci yang ada dalam 205 dokumen yang berasal dari dataset Scopus dan memvisualisasikannya dalam tiga gambar: *Network*, *Overlay* dan *Density*. Dari 205 publikasi yang memuat kata kunci tersebut, analisis *co-occurrence* dengan menggunakan VosViewer, mengambil seluruh kata kunci dari

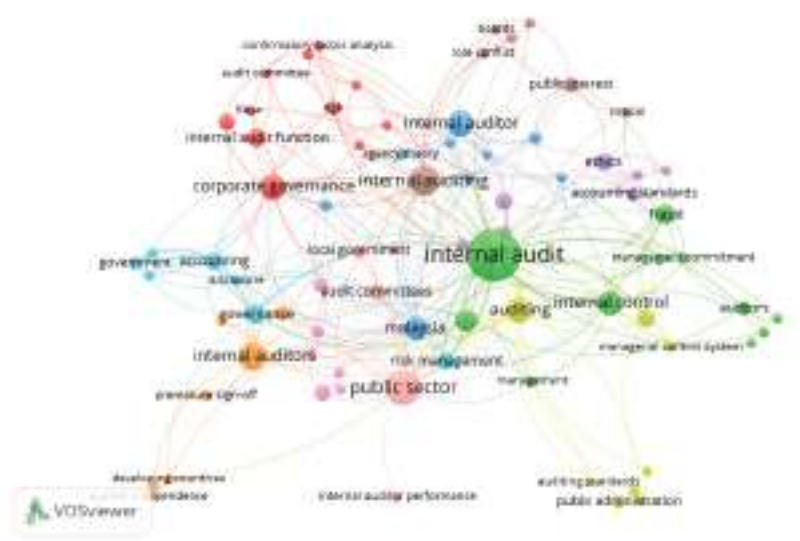
Gambar 3. Afiliasi Terbanyak



pengarang dengan menggunakan metode *full counting* sehingga seluruh kemunculan kata kun-

ci “*internal auditing*” dan “*public*” akan dihitung frekuensi dan bobotnya. Dari 520 kali kemun-

Gambar 4. Hasil Analisis *Co-occurrence*



culannya di seluruh dokumen tersebut, terdapat 79 kata kunci yang kemunculannya minimum sebanyak dua kali sebanyak 79 kata kunci, dengan 78 kata kunci yang menunjukkan hubungan. Hasil analisis ditampilkan dalam Gambar 4.

Kata kunci “*internal audit*” merupakan kata kunci yang paling banyak muncul dan paling banyak memiliki hubungan (48 kemunculan dan 77 konektivitas). Hal ini ditandai dengan besarnya bulatan (terbesar diantara kata kunci lain). *Link* atau bobot hubungan ditandai dengan garis yang menghubungkan antar bulatan satu dengan bulatan lainnya, dan jarak antar satu bulatan dengan bulatan lainnya menunjukkan kekuatan hubungan.

an. Kata kunci dengan bulatan besar kedua adalah “*public sector*” dengan 21 kemunculan dan 37 konektivitas, disusul dengan kata kunci “*internal auditing*” dengan 16 kemunculan dan 26 konektivitas dan “*internal auditors*” dengan 13 kemunculan dan 19 konektivitas.

- Network Visualization

Terdapat 10 klaster yang dihasilkan dari hubungan 78 kata kunci. Klaster pertama (warna merah) terdiri dari 11 kata kunci, merupakan kelompok publikasi yang menggunakan kata kunci di antaranya adalah “*corporate governance*” yang memiliki kemunculan sebanyak 11 kali dan terkait ke 23 kata kunci lainnya, “*internal audit function*”

(6 kemunculan dan 9 keterkaitan), “*internal audit quality*” (5 kemunculan dan 6 keterkaitan), “*risk*” (4 kemunculan dan 9 keterkaitan), dan “*audit committees*” (5 kemunculan dan 12 keterkaitan). Menariknya, terdapat kata kunci “indonesia” dan “libya” pada klaster pertama yang mengindikasikan bahwa terdapat publikasi yang mengambil kasus dari dua negara ini. Kata kunci “indonesia” berhubungan ke kata kunci “*fraud risk judgment*”, “*professional skepticism*” dalam satu klaster dan memiliki hubungan juga ke kata kunci “*effectiveness*” di klaster 3 dan “*internal audit*” di klaster 2. Terlihat bahwa pada klaster pertama ini, publikasi-publikasinya membahas hubungan *corporate governance* dengan **fungsi internal audit** dan **kualitas** dari audit internal.

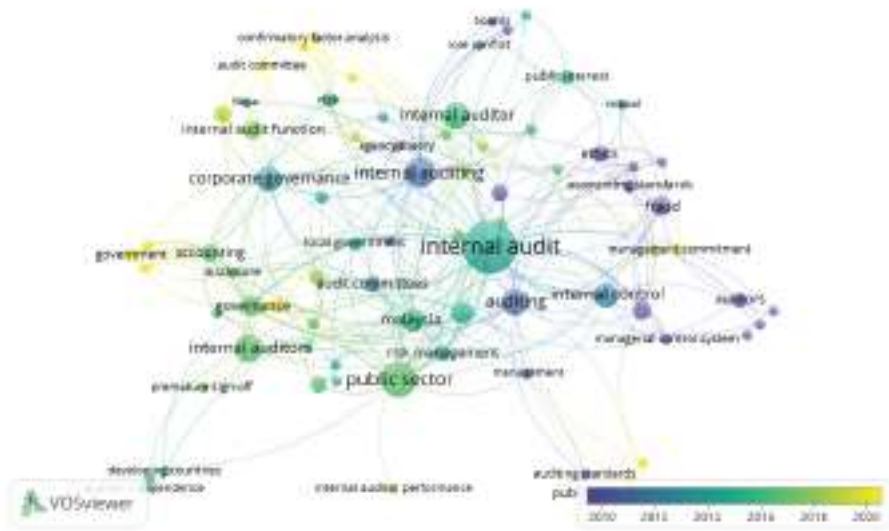
Klaster 2 (hijau) terdiri dari 11 kata kunci di antara: “*internal audit*”, “*internal control*”, “*fraud*”, “*management commitment*”, dan “*accountability*”. Klaster ini berkaitan dengan publikasi yang membahas audit internal, kaitannya dengan **akuntabilitas** dan **kecurangan**. Sementara Klaster 3 (biru) membahas publikasi yang terkait dengan **internal auditor** dan **good corporate governance** kaitannya dengan **teknologi**. Adapun klaster 4 (kuning) terdiri dari publikasi yang memuat kata kunci

auditing dengan **standar pemeriksaan** dan administrasi publik meskipun jaraknya masih terhitung jauh antara bulatan. Klaster kelima (ungu) berhubungan dengan **efektivitas audit kinerja**. Klaster keenam (biru muda) berkaitan dengan pengungkapan **kualitas informasi akuntansi**. Klaster ketujuh (oranye) berhubungan dengan publikasi yang membahas **independensi** auditor internal pada perusahaan publik di negara berkembang. Adapun klaster kedelapan (coklat) membahas hubungan internal auditing dengan peran konflik dan hubungannya dengan **kepentingan publik**. Klaster kesembilan meliputi **efektivitas internal audit** dalam melakukan audit kinerja di Pendidikan tingkat tinggi. Sementara klaster terakhir (jingga), membahas **kinerja internal audit** di sektor publik/pemerintah daerah.

- Overlay Visualization

Dari visualisasi *overlay* Gambar 5 dapat kita lihat evolusi pembahasan dan diskusi akademisi dunia selama empat dasawarsa. Terlihat bahwa bahwa tema-tema awal (tahun 2010-2011) dari publikasi terkait “*internal auditor*” berkaitan dengan pedoman dan standar audit (berwarna ungu tua). Penggunaan teknologi dan penggunaan metode

Gambar 5. Visualisasi *Overlay*

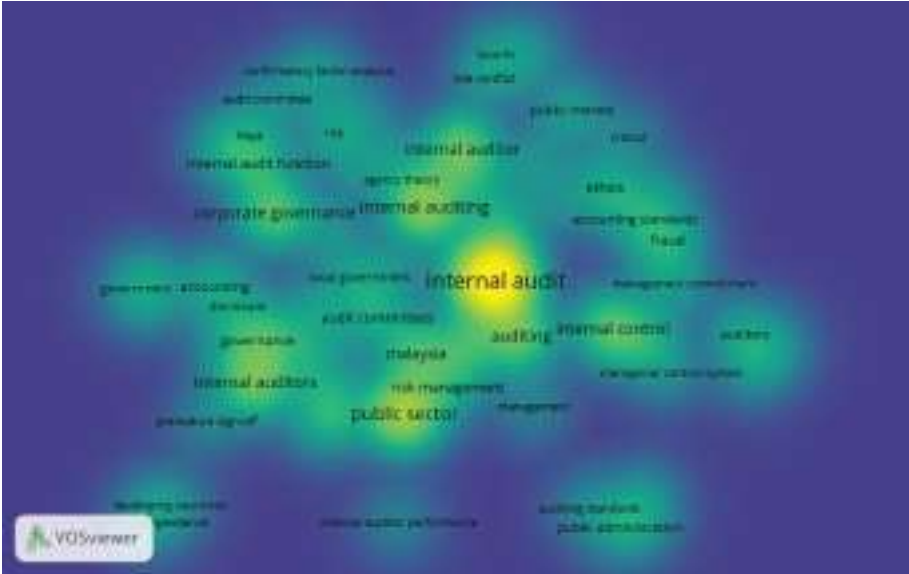


seperti *exploratory factor analysis* atau *confirmatory factor analysis* juga menjadi topik-topik terkini (bulatan berwarna kuning, tahun 2019-2020).

- *Density Visualization*

Density visualization pada Gambar 6 menunjukkan bahwa diskusi mengenai audit internal (warna kuning menunjukkan bahwa publikasi terkait tema ini sudah cukup banyak) telah banyak dilakukan selama 40 tahun terakhir. Namun, publikasi yang menghubungkan antara auditor internal di ranah sektor publik masih sangat terbatas terlihat dari kepadatan yang divisualisasikan dengan warna yang masih hijau menandakan fre-

kuensinya masih belum banyak. Penggunaan teknologi yang terlihat pada dua visualisasi sebelumnya, tidak nampak di *visualisasi density* menandakan bahwa topik terkait “*internal auditor*” dan penggunaan teknologi sangat terbatas. Hal ini belum sejalan dengan keinginan dari KPMG yang menyarankan bahwa auditor internal di masa mendatang dapat meningkatkan kapasitas dan keterampilan, dengan menggunakan teknologi dan keterampilan baru seperti data analitik, *big data*, *artificial intelligent* dan lainnya (*new skill and capabilities*) sehingga dapat mengakomodasi kepentingan *stakeholder* dengan lebih cepat (KPMG, 2022).

Gambar 6. *Density Visualization*

Insight

Dari uraian di atas terlihat bahwa publikasi dari akademisi di dunia terkait “*internal auditor*” dan “*public*” mengalami peningkatan dalam 20 tahun terakhir. Namun demikian, meskipun Indonesia merupakan negara peringkat ketiga terproduktif yang menghasilkan publikasi di tema ini, jumlah afiliasi dengan universitas lainnya masih terbatas, sehingga kita berharap ke depannya universitas-universitas di Indonesia dapat meningkatkan kerja sama dengan universitas lainnya. Dari *network* visualisasi kita dapat melihat diskusi yang telah berjalan selama empat dekade terakhir terkait “*internal auditor*” berkisar pada:

- Fungsi dan kualitas internal audit,
- Akuntabilitas dan kecurangan,
- *Internal audit* dan *good corporate governance*,
- Standar pemeriksaan,
- Efektivitas audit kinerja,
- Pengungkapan,
- Independensi internal auditor,
- Efektivitas internal auditor,
- Kinerja internal audit,

Kemudian dari *overlay* dan *density visualization*, kita dapat melihat tema-tema terkini yang berpeluang untuk dielaborasi lebih lanjut oleh para akademisi dunia, contohnya tema terkait penggunaan teknologi oleh auditor internal dan audit kinerja di pemerintah daerah.

References

- Andrew D. Chambers, & Marjan Odar. (2015). *A new vision for internal audit*. *Managerial Auditing Journal*, 30(1), 34-55.
- Chambers, A. (2008). *The board's black hole - Filling their assurance vacuum: Can internal audit rise to the challenge?* *Measuring Business Excellence*, 12(1), 47-63. <https://doi.org/10.1108/13683040810864387>
- Chambers, A. D. (2014). *New guidance on internal audit - an analysis and appraisal of recent developments*. *Managerial Auditing Journal*, 29(2), 196-218. <https://doi.org/10.1108/MAJ-08-2013-0925>
- KPMG. (2022). *Internal audit — Trusted and disrupted*.

SERI KEPEMIMPINAN GRC:
GOVERNING BODY
PENGENDALIAN INFLASI
DI DAERAH¹

Rudy M. Harahap

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan

Ketika mengimplementasikan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan (*governance, risk management, and compliance*) atau populer disingkat GRC, penting sekali setiap organisasi memastikan berjalannya peran dewan atau pihak yang berwenang dalam menatakelola (*governing body* atau *authority*).

Di sektor swasta, dewan ini biasanya mendapatkan keyakinan (*assurance*) terkait GRC dengan melakukan pengujian langsung ke lapangan, mendapatkan informasi dari mereka yang bertanggung jawab dalam manajemen risiko dan kepatuhan, dan atau mendapatkan

informasi dari auditor internal sebagai pemberi informasi yang independen.

Pada praktiknya, di sektor swasta, dewan yang menatakelola ini biasanya diperankan oleh dewan komisaris atau dewan pengawas. Masalahnya, siapa yang memerankannya di sektor publik seperti pemerintahan daerah?

Artikel ini akan menjawab pertanyaan tersebut berdasarkan observasi praktik pengendalian inflasi di daerah. Pengendalian inflasi ini sedang gencar didorong oleh Pemerintahan Jokowi menyikapi krisis akibat Perang Rusia-Ukraina.

¹ Tulisan ini dimodifikasi dari Sosialisasi Pengendalian Inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan dan Sejauh Mana Kejaksaan di Daerah Dapat Berperan, di Aula Anjung Papadaan, Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (31/1), mengacu kepada rerangka *Extended Enterprise Risk Management* (EERM) yang dikembangkan oleh *the Institute of Risk Management* (IRM).

Peran Forkopimda Menurut Regulasi

Secara praktik, dalam menyikapi isu-isu yang berkembang di daerah, kepala daerah tidak bekerja sendiri. Para kepala daerah ini akan didampingi oleh anggota Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang disingkat Forkopimda.

Secara legal, keberadaan Forkopimda dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022, yang dibentuk pada berbagai tingkatan di daerah, yaitu dari mulai tingkatan provinsi, kabupaten/kota, dan kemudian kecamatan.

Keanggotaan Forkopimda berasal dari berbagai unsur di daerah. Sebagai contoh, pada tingkatan provinsi, Forkopimda diketuai oleh gubernur. Anggotanya berasal dari ketua DPRD provinsi (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk Provinsi Aceh atau ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua untuk Provinsi Papua), kepala kepolisian daerah, dan kepala kejaksaan tinggi.

Selain itu, anggota Forkopimda lainnya adalah Panglima Komando Daerah Militer atau Komandan Komando Resor Militer, Panglima Komando Armada atau Komandan Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) atau Komandan Pangkalan TNI AL, dan Panglima Komando Operasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) atau Komandan Pangkalan TNI AU.

Pimpinan instansi tertentu di daerah juga dapat diangkat dalam keanggotaan tersebut.

Forkopimda utamanya digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di daerah. Sebagai contoh, urusan ini akan terkait dengan koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di daerah dan menyelesaikan permasalahan yang timbul. Tentunya, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, dan potensi serta keanekaragaman daerah.

Yang paling penting juga, Forkopimda berperan terkait pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di daerah. Mereka juga terlibat dalam peningkatan keselarasan langkah dan tindakan dalam pelaksanaan penyelesaian permasalahan di daerah. Selain itu, mereka terlibat dalam penyelesaian berbagai permasalahan melalui pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendasak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat. Tentunya, mereka akan terlibat dalam pemeliharaan stabilitas sosial politik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri di daerah.

Melihat hal-hal yang diuraikan tersebut, Forkopimda sebenarnya bisa berperan strategis sebagai *governing body* atau *authority*

dalam GRC di daerah. Sebagai contoh, Forkopimda dapat berperan strategis dalam GRC pengendalian inflasi di daerah. Dengan kata lain, keberhasilan pengendalian inflasi di daerah tidak bisa dilepaskan dari peran Forkopimda.

Buktinya, Jaksa Agung pada Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia Tahun 2023, di Sentul International Convention Centre (SICC), Sentul, Jawa Barat (17/01/2023), telah menyatakan pentingnya peran Kejaksaan di daerah sebagai salah satu anggota Forkopimda dalam pengendalian inflasi.

Karena itu, bagian berikut akan menguraikan terlebih dahulu pengertian GRC organisasi sektor publik, proses bisnis dan tantangan pengendalian inflasi di daerah, GRC lintas sektoral dan lintas organisasi dalam pengendalian inflasi, dan kemudian peran strategis Forkopimda dalam pengendalian inflasi bersama auditor internal.

GRC Organisasi Sektor Publik

Di Indonesia, GRC organisasi sektor publik diaktualisasikan pada rerangka Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Rerangka tersebut dikembangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yang membagi GRC di suatu or-

ganisasi sektor publik pada tiga bagian, yaitu dimulai dari penetapan tujuan, pelaksanaan struktur dan proses pengendalian dan manajemen risiko, dan pemastian pencapaian tujuan SPIP itu sendiri.

Penetapan tujuan pada dasarnya adalah terkait dengan manajemen strategis (*strategic management*), yang dimulai dari penetapan sasaran strategis dan strategi yang perlu dikembangkan setiap organisasi sektor publik dalam mencapai sasaran strategis. Biasanya, di sebuah organisasi sektor publik, penetapan tujuan ini dipimpin oleh Biro Perencanaan Strategis atau Biro Organisasi.

Selanjutnya, pada struktur dan proses, terdapat siklus berkelanjutan dari manajemen risiko dan kepatuhan (*risk and compliance management*). Siklus ini dimulai dari lingkungan pengendalian. Pada tahapan ini, harus dipastikan keberadaan upaya penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, auditor internal berperan dengan efektif, dan terjalinnya hubungan kerja yang baik.

Kemudian, terdapat penilaian risiko, yang dimulai dari identifikasi risiko yang mungkin terjadi di organisasi, yang dilanjutkan dengan analisis atas risiko yang telah diidentifikasi.

Setelah itu, kegiatan pengendalian pun dimulai, berupa re-viu kinerja, pembinaan SDM, pengendalian sistem informasi, pengendalian fisik atas aset, penetapan dan re-viu indikator dan ukuran kinerja, pemisahan fungsi otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting, pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian, pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya, akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya, dan dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian internal dan transaksi serta kejadian penting.

Untuk mendukung siklus tersebut, setiap organisasi perlu memastikan tersedianya informasi yang relevan dengan kebutuhan organisasi dan terjadinya komunikasi yang efektif. Kemudian, dalam rangka memastikan semua unsur SPIP berjalan dengan baik, langkah terakhir adalah pemantauan yang berkelanjutan dan evaluasi terhadap seluruh proses pengendalian dan manajemen risiko. Pemimpin dari struktur dan proses ini di sebuah organisasi sektor publik biasanya adalah Biro Perencanaan yang difasilitasi oleh Inspektorat.

Jika penetapan tujuan beserta struktur dan proses tersebut berjalan dengan baik, maka tujuan SPIP akan tercapai. Ukurannya adalah program/kegiatan organisasi berjalan secara efektif dan efisien (yang biasanya dipimpin oleh Biro Perencanaan

atau Biro Manajemen Kinerja), laporan-laporan organisasi (termasuk laporan keuangan) dapat diandalkan (yang biasanya dipimpin oleh Biro Keuangan), aset negara/daerah terjaga dan dimanfaatkan (yang biasanya dipimpin oleh Biro Perlengkapan bersama Biro Keuangan), dan organisasi beserta individunya taat terhadap peraturan yang berlaku (yang biasanya dipimpin oleh Biro Hukum bersama Inspektorat).

Pada akhirnya, setelah tiga bagian tersebut diterapkan, akan dinilai keberhasilan penerapan GRC organisasi sektor publik dengan tiga indeks, yakni Manajemen Risiko Indeks (MRI), kapabilitas APIP, dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Penilaiannya dilakukan oleh masing-masing auditor intern organisasi, yang kemudian dievaluasi oleh BPKP.

Proses Bisnis dan Tantangan Pengendalian Inflasi

Proses bisnis pengendalian inflasi sebagai program/kegiatan yang sifatnya lintas sektoral dan lintas organisasi pada dasarnya beroperasi seperti penjelajahan atau pelayaran (*endeavour*). Tampak pada gambar berikut berbagai aktor yang berlayar bersama dalam pengendalian inflasi.

Secara normatif, pengendalian inflasi biasanya dilakukan dengan pendekatan makro melalui intervensi tingkat bunga. Karena itu, sebagaimana tampak pada

harga pangan, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

Menyikapi 4K tersebut, beberapa hal telah dilakukan di daerah. Sebagai contoh, untuk mendukung keterjangkauan harga pangan di suatu daerah, sejumlah 32 ton beras disubsidi dan tercatat 331 warga sebagai penerima bantuan beras.

Kemudian, dalam mendukung ketersediaan pasokan dan penanaman, telah dilakukan pemasokan sejumlah 1.000 ton cadangan pangan daerah (CPD) lewat Bulog dan disalurkan sejumlah 55.000 bibit cabai.

Dalam hal kelancaran distribusi, telah dilaksanakan dua kesepakatan kerjasama antar daerah (KAD) dan sejumlah 3.000 ton beras akan dikirim dari daerah lain. Terakhir, untuk menjaga komunikasi efektif, sudah dilaksanakan 3 kali rapat koordinasi TPID di tahun 2022.

Dilihat dari segi GRC lintas sektoral dan lintas organisasi pengendalian inflasi, juga teridentifikasi beberapa isu terkait kepemimpinan, manajemen, dan tata kelola (*leadership, management, and governance*) dalam pengendalian inflasi, yaitu beberapa kepala daerah tidak terlibat secara langsung dalam pengendalian inflasi.

Kemudian, beberapa kebijakan pengendalian inflasi belum ditetapkan, seperti penetapan peraturan kepala daerah tentang penggunaan belanja tidak terduga (BTT). Selain itu, TPID ternyata belum

memiliki rencana kerja yang rinci dan terjadwal, belum melakukan *capacity building* yang nyata (termasuk studi tiru ke daerah-daerah yang berhasil mengendalikan inflasi), serta belum menyusun *roadmap* pengendalian inflasi, yang mengakibatkan program/kegiatan pengendalian inflasi tidak terpadu dan tidak tepat sasaran.

Teridentifikasi juga dinamika-dinamika yang berkembang dalam GRC lintas sektoral dan lintas organisasi pengendalian inflasi. Pertama, mekanisme “insentif” bagi pemerintah daerah yang berhasil mengendalikan inflasi terbatas berupa Dana Insentif Daerah (DID), sedangkan bagi yang tidak berhasil baru berupa presentasi langsung kepala daerah tentang penyebab kegagalan di hadapan Menteri Dalam Negeri. Namun, tidak terdapat sanksi khusus kepada kepala daerah yang gagal dalam mengendalikan inflasi.

Kedua, terkait program kerja, teridentifikasi bahwa pemerintah daerah yang gagal dalam mengendalikan inflasi cenderung merancang program kerja secara normatif, tidak inovatif, dan tidak menyesuaikan kondisi kedaerahan. Sebagai contoh, sebuah daerah yang umumnya masyarakatnya menjadi konsumen, program kerjanya haruslah berorientasi konsumen (seperti menyediakan gudang dengan kapasitas yang besar untuk menyimpan persediaan pangan), tetapi hal ini tidak dilakukan.

Ketiga, terkait regulasi dan kewenangan, TPID dipimpin oleh kepala daerah sebagai ketua dan secara formal ketua harian TPID adalah sekretaris daerah. Namun, yang paling banyak berperan di lapangan adalah Kepala Perwakilan Bank Indonesia.

Kemudian, teridentifikasi yang bertanggung jawab dalam keterjangkauan harga adalah Dinas Perdagangan, sedangkan Dinas Ketahanan Pangan bertanggung jawab terhadap ketersediaan pasokan. Dinas Perhubungan bertanggung jawab terhadap kelancaran distribusi, sedangkan Dinas Komunikasi dan Informasi bertanggung jawab memastikan komunikasi yang efektif.

Dengan pembagian tugas tersebut, seluruh pihak mestinya menyadari upaya masing-masing pihak akan saling berkaitan dalam pengendalian inflasi. Karena itu, mereka perlu melakukan kolaborasi, berlayar bersama-sama dalam menjalankan program/kegiatan pengendalian inflasi yang terintegrasi, terutama dengan melibatkan pelaku utama pengendalian inflasi, yaitu para kepala daerah, TPID, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Bulog setempat, dan kantor Badan Pusat Statistik (BPS) setempat.

Pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengendalian inflasi tersebut juga harus mampu mengidentifikasi risiko-risiko dalam program/kegiatan pengendalian inflasi, seperti harga pangan tidak terjangkau, distribusi

barang tidak stabil, transportasi antar daerah terhambat, pasokan bahan pokok tidak diinventarisasi secara berkala, dan reputasi negatif bagi instansi vertikal dan daerah jika suatu daerah gagal mengendalikan inflasi.

Terhadap risiko yang telah teridentifikasi tersebut, para pelaku terkait pengendalian inflasi harus menyusun strategi mitigasi risiko, seperti memastikan berjalannya manajemen rantai nilai pemasok dan layanan pemangku, yaitu mulai dari monitoring pasokan, monitoring harga, monitoring distribusi, serta menyampaikan hasil monitoring dan rekomendasi perbaikan dalam berbagai rapat TPID.

Pelaksanaan program/kegiatan pengendalian inflasi juga harus dipantau secara berkala oleh Biro Perekonomian. Masing-masing kepala daerah juga mendapatkan keyakinan yang independen dari Inspektorat Daerah terkait program/kegiatan pengendalian inflasi. Nantinya, hasil pemantauan ini akan disampaikan dalam rapat rutin TPID untuk didiskusikan bersama terkait perbaikan program/kegiatan pengendalian inflasi.

Yang menjadi tantangan utama suatu daerah yang telah menjalankan program/kegiatan pengendalian inflasi lintas sektoral dan lintas organisasi adalah harga beras lokal yang tidak terjangkau (bahkan sudah mendekati kenaikan dua kali lipat dari tahun sebelumnya), pasokan beras lokal

tidak tersedia, distribusi tidak lancar, dan komunikasi TPID tidak efektif.

Peran Strategis Forkopimda Bersama Auditor Internal

Memperhatikan proses bisnis dan tantangan program/kegiatan pengendalian inflasi tersebut, GRC pengendalian inflasi yang lintas sektoral dan lintas organisasi harus dikawal secara berlapis-lapis.

Sebagaimana tampak pada gambar, pengawalan yang berlapis-lapis dilakukan oleh BPKP di daerah sebagai Kapal Pandu, Inspektorat Daerah atau aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) sebagai Kapal Patroli, dan Forkopimda sebagai Kapal Induk.

BPKP sebagai Kapal Pandu telah melakukan beberapa kegiatan. Sebagai contoh, BPKP melakukan pendampingan penyusunan program/kegiatan pengendalian inflasi, fasilitasi rencana aksi pemulihan gagal panen padi dalam rangka pengendalian inflasi pangan, evaluasi efektivitas program/kegiatan pengendalian inflasi, dan *focus group discussion* (FGD) peningkatan produksi padi bersama Bank Indonesia.

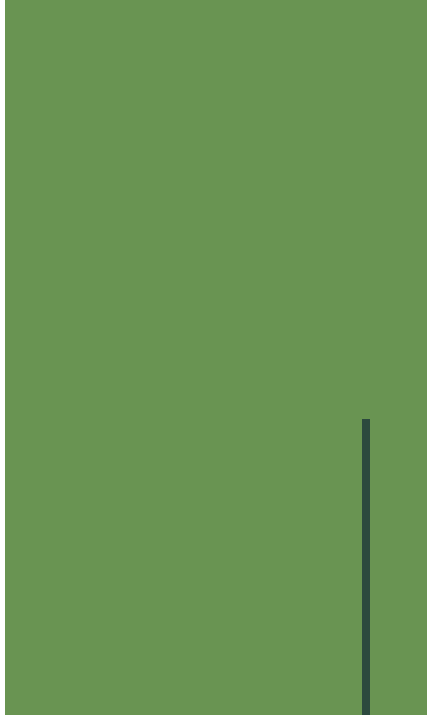
Inspektorat Daerah sebagai Kapal Patroli telah ditugasi oleh Menteri Dalam Negeri untuk melaporkan kondisi inflasi di daerah masing-masing secara harian. Namun, realitanya, hal ini belum dilakukan oleh semua Inspektorat Daerah, yang mengindikasikan belum seluruh APIP terlibat

langsung dalam pengendalian inflasi. Bahkan, Inspektorat Daerah sering tidak diikutsertakan dalam rapat TPID. Artinya, peran dan kapasitas Inspektorat Daerah yang dialokasikan dalam pengendalian inflasi masih terbatas.

Memperhatikan kondisi tersebut, Forkopimda sebagai Kapal Induk yang mengawal GRC pengendalian inflasi di daerah perlu mengerahkan seluruh jajaran di berbagai penjuru nusantara untuk membantu pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi, yaitu melalui pendampingan langsung perencanaan dan anggaran di masing-masing pemerintah daerah, pendampingan hukum (termasuk memitigasi risiko hukum), dan mengakselerasi BTT untuk kepentingan pengendalian inflasi. Ketiga hal ini akan menciptakan stabilitas perekonomian di daerah.

Penutup

Artikel ini telah menguraikan secara jelas peran strategis Forkopimda dalam pengendalian inflasi di daerah. Karena itu, seluruh pelaku di daerah perlu memastikan berjalannya peran Forkopimda sebagai *governing body* atau *authority* program/kegiatan pengendalian inflasi di daerah bersama dengan berbagai pelaku yang telah ada saat ini. Forkopimda juga perlu berkoordinasi lebih lanjut dengan TPID untuk memastikan berjalannya peran strategis tersebut.***



BPKPgoid



BPKPgoid



BPKP_id

www.bpkp.go.id